

PROVINSI JAMBI

CITRA BENGKULU DALAM ARSIP



PROVINSI SUMATERA SELATAN

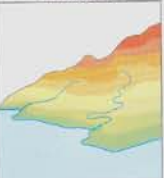


Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, November 2008

DIAGRAM LOKASI



KETINGGIAN DALAM METER



CITRA BENGKULU DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, November 2008



Lambang Pemerintah Provinsi Bengkulu



AGUSTIN TERAS NARANG, SH.
Gubernur Kalimantan Tengah
Periode 2005-2010



R. ATU NARANG, SE.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 2004-2009



IR. H. ACHMAD DIRAN
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Periode 2005-2010



IR. THAMPUNAH SINSENG, DIPL. HE.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2005 - sekarang

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH



Brigadir Jenderal Polisi
DRS. DINAR, MBA.
Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Tengah



Kolonel Infanteri
JUDI HARIANTO
Komandan Resort Militer 102
Panju Panjung, Kalimantan Tengah



DANIEL TOMBE MARRUNG, SH., MH.
Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Tengah



PANTO ALBUIN SIANIPAR, SH.
Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah

GUBERNUR DAN PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 1 JANUARI 1957 – 2008



Raden Tumenggung
Arya Milono
cvGubernur
01-01-1957
s/d 30-06-1958



Tjilik Riwut
Gubernur
30-06-1958
s/d 17-02-1967



Ir. Reynold Sylvanus
Gubernur
07-02-1967
s/d 03-10-1978



Willy Ananias Gara
Gubernur
03-10-1978
s/d 07-10-1983



Eddy Sabara
Pejabat Gubernur
07-10-1983
s/d 23-01-1984



Gatot Safari Amrih, SH
Gubernur
23-10-1984
s/d 21-01-1989



Drs. Soeparmanto
Gubernur
23-01-1989
s/d 22-01-1993



Drs. Warsito
Rasman, MA.
Gubernur
22-01-1993
s/d 19-07-1999



Rappiudin
Hamarung, SH
Pejabat Gubernur
17-07-1999
s/d 08-03-2000



Drs. Asmawi Agani
Gubernur
08-03-2000
s/d 23-03-2005



DR. Sodjuangan
Situmorang, MSi.
Pejabat Gubernur
23-03-2005
s/d 04-08-2005



Agustin Teras Narang
Gubernur
04-08-2005
s/d 2010

KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1958 – 2008



Oesman Abdullah
1958-1960



Tjilik Riwut
1961-1965



H.M. Kasjful Anwar
1965-1968



Amir Hamzah, SH.
1969-1971



Willy Ananias Gara
1971-1979



E.A. Toewak
1979-1982



H.Darlam A.M. Atjeh
1982-1987



H. Soeshandoko
1987-1997



Drs.H.Duwiter
Mangkusari
1997-1999



H. Endang Kosasih
PAW (1999)



H.S.A. Fawzy Zain B.
1999-2004



R. Atu Narang, SE.
2004-2009

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
1961 – 2008



Ir. Reynold Sylvanus
1961 - 1967



Victor Phaing
1986 - 1991



H.J. Andries
1991 – 1996



Ir. E. Gerson
1996 – 1998



Drs. Siswanto Adi
1998 – 1999



Nahson Taway
2000-2005



Ir. H. Achmad Diran
2005-sekarang

**WALIKOTA/BUPATI
DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 2008**



Ir. Tuah Pahoe
Walikota Palangka Raya



Ir. Willy M. Yoseph
Bupati Murung Raya



Drs. H. Zain Alkim
Bupati Barito Timur



Ir. Yuliansyah
Bupati Barito Utara



Ir. Bahruddin H. Lisa
Bupati Barito Selatan



H. Achmad Amur, SH
Bupati Pulang Pisau



Drs. Duwel Rawing
Bupati Katingan



H. Darwan Ali
Bupati Seruyan



Drs. H. Nawawi Mahmuda
Bupati Sukamara



Drs. HM. Gusti M. Afhani
Bupati Lamandau



Ir. H. Muhammad Mawardi, MM
Bupati Kapuas



Drs. J. Djudae Anom
Bupati Gunung Mas



Ujang Iskandar, ST
Bupati Kotawaringin Barat



Drs. M. Wahyudi K. Anwar
Bupati Kotawaringin Timur

LAMBANG PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI LINGKUNGAN PROVINSI BENGKULU



Kabupaten
Rejang Lebong



Kota
Bengkulu



Kabupaten
Bengkulu
Utara



Kabupaten
Bengkulu
Selatan



Kabupaten
Barito Selatan



Kabupaten
Pulang Pisau



Kabupaten
Katingan



Kabupaten
Seruyan



Kabupaten
Sukamara



Kabupaten
Lamandau



Kabupaten
Kapuas



Kabupaten
Gunung Mas



Kabupaten
Kotawaringin
Barat



Kabupaten
Kotawaringin
Timur



Peta Provinsi Kalimantan Tengah
didasarkan pada wilayah Kabupaten/Kota

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Bengkulu merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi salah satu objek wisata unggulan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai

peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah dinamika perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 18 November 2008
Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Halaman Judul | i |
| Lambang Provinsi Kalimantan Tengah | iii |
| Foto Gubernur Kalimantan Tengah | iv |
| Foto Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 2004-2009 | v |
| Foto Wakil Gubernur Kalimantan Tengah | vi |
| Foto Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | vii |
| Foto Muspida Provinsi Kalimantan Tengah | viii |
| Foto Gubernur dan Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Periode 1957-2008 | ix |
| Foto Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 1958-2008 | x |
| Foto Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 1961-2008 | xi |
| Foto Walikota/Bupati di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah | xii |
| Lambang-lambang Pemerintah Kota/Kabupaten | xiii |
| Peta Provinsi Kalimantan Tengah | xiv |
| Sambutan Kepala ANRI | xv |
| Daftar Isi | xviii |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Letak Geografis | 4 |
| C. Arti Lambang Provinsi Kalimantan Tengah | 6 |
| D. Perkembangan Sejarah Kalimantan Tengah | 7 |
| 1. Periode Kerajaan | 9 |
| 2. Periode Kolonial Bangsa Eropa | 11 |
| 3. Periode 1942 - 1945 | 14 |
| 4. Periode 1945 - 2008 | 16 |
| E. Kalimantan Tengah dalam Khasanah Arsip | 27 |
| Daftar Pustaka | 29 |
| CITRA KALIMANTAN TENGAH DALAM ARSIP | 30 |
| Geografis | 31 |
| Politik dan Pemerintahan | 42 |
| Pertahanan dan Keamanan | 79 |
| Perekonomian | 87 |
| Pendidikan | 100 |
| Kesenian dan Kebudayaan | 113 |
| Infrastruktur | 139 |
| Keagamaan | 158 |
| DAFTAR ARSIP | 169 |
| PENUTUP | 189 |

Pendahuluan

CITRA BENGKULU DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), kebangsaan (*nasionalitas*) dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan mencerminkan keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu kepada daerah perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan OTDA melalui Program Citra Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang akan menerima Citra Daerah pada tahun 2008 ini adalah Provinsi Bengkulu .

Arsip Bengkulu yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu mulai awal abad-17 sampai dengan abad-20, yaitu sejak masa *Vereeniging Oost Indische Compagnie* (VOC) sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Bengkulu pada periode tersebut. Citra Bengkulu Dalam Arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Bengkulu pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

A. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

Letak geografis Bengkulu berada pada $2^{\circ} 20' \text{ LS} - 5^{\circ} \text{ LS}$ dan $101^{\circ} 31' \text{ BT} - 103^{\circ} 86' \text{ BT}$. Wilayah Bengkulu bagian utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian selatan dan barat dengan Samudera Indonesia, di sebelah tenggara dengan Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Wilayah Bengkulu telah didiami penduduk sejak zaman prasejarah, hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya prasasti dibagian utara Bengkulu, yaitu bangunan megalitik tipe dongson dibagian selatan Bengkulu.

B. ARTI LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI



Lambang Daerah Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 43/DPRD-1 Tahun 1973.

Lambang Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 Bagian, yaitu :

1. Berbentuk Tameng.
2. Ditengah-tengah terdapat tameng kecil yang didalamnya berisikan setangkai padi dan setangkai kopi bersama

- daunnya, sedangkan ditengah-tengahnya terdapat bunga Raflesia, Rudus, Cerana dan Bintang besar.
3. Sebuah pita yang bertuliskan "BENGGKULU".

Arti Warna :

1. Hijau berarti Kesuburan.
2. Biru berarti Kemakmuran.
3. Merah berarti dinamika/kegembiraan.
4. Ungu berarti ketenangan/kedamaian.
5. Kuning berarti kejayaan.

Makna Warna :

1. Warna hijau dalam tameng mencerminkan daerah pegunungan bukit barisan dengan tanahnya yang subur sebagai batas tanah daerah Provinsi Bengkulu sebelah timur.
2. Warna biru berombak dengan delapan belas gelombang, berarti laut dengan sumber kekayaan sebagai batas daerah Provinsi Bengkulu sebelah barat.
3. Dalam tameng kecil terdapat :
 - a. Disebelah kiri setangkai padi yang berwarna kuning, buah padi bercelah 17 butir.
 - b. Disebelah kanan terdapat setangkai buah kopi berwarna merah, daun kopi berwarna hijau, bunga kopi berwarna putih dan buah kopi berjumlah 8 dalam setiap tangkai banyaknya 5, daun kopi berjumlah 11 helai dan tulang daun kopi bagian atas berjumlah 4 garis, bagian bawah berjumlah 5 garis.

Arti/makna lambang Daerah Provinsi Bengkulu :

1. Padi 17 butir artinya tanggal 17, biji kopi 8 butir artinya bulan 8, tulang daun kopi bagian atas berjumlah 4 garis, bagian bawah berjumlah 5 garis artinya tahun 1945, arti keseluruhannya adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Garis gelombang 18 adalah hari jadinya Provinsi Bengkulu.
3. Daun kopi berjumlah 11 lembar menggambarkan bulan kelahiran Provinsi Bengkulu, yaitu November.

4. Bunga kopi setiap tangkai berjumlah 6 dan buah kopinya setiap tangkai 8 menggambarkan tahun kelahiran Provinsi Bengkulu, yaitu 1968.
5. Buah padi dan kopi mencerminkan hasil utama dibidang pertanian dan perkebunan.
6. Bunga Rafflesia Arnoldi sebagai suatu keistimewaan alam daerah Provinsi Bengkulu.
7. Bingkai berwarna emas yang mengitari lambang melukiskan salah satu sumber mineral di daerah Provinsi Bengkulu.
8. Cerana melukiskan kebudayaan rakyat.
9. Rudus 2 buah melambangkan kepahlawanan.
10. Bintang besar dipertuan ujung padi dan kopi melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. LINTASAN SEJARAH

1. Periode Sebelum Kolonialisme Bangsa Eropa

Berdasarkan catatan sejarah, belum dapat dipastikan penduduk pendahulu dari masyarakat Bengkulu yang saat ini menempati wilayah Barat dari Pulau Sumatera ini. Karena letaknya berada di sekitar Pusat Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, boleh jadi Bengkulu dahulu mungkin salah satu dari daerah atau wilayah yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya.

Jauh sebelum persentuhan Bengkulu dengan dunia luar, Bengkulu telah memiliki sistem pemerintahan yang disebut **Negara Suku**. Dan seperti lazimnya Negara Suku, wilayahnya tentu tidak luas, rakyatnya sedikit, serta kepala pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh kepala suku itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah memelihara tata tertib ke dalam, serta menghadapi musuh dari luar baik dalam kaitan yang sifatnya defensif (pertahanan) maupun agresif (perluasan wilayah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik organisasi, sistem, maupun penyelenggaraan pemerintahan negara suku ini masih sangat sederhana dan tradisional.

Daerah Bengkulu mulai dikenal sebagai daerah ramai dan menjadi tempat persinggahan perdagangan yaitu pada abad ke-15. Pada masa itu, para pedagang dari Aceh dan Pajajaran sudah mulai menjalin hubungan dagang dengan daerah

Bengkulu. Bahkan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten tahun 1552-1570, Sungai Bengkulu kemudian dijadikan sebagai batas wilayah Kesultanan Banten.

Nama Bengkulu diambil dari kisah perang antara penduduk setempat melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak dari Ratu Agung Raja Sungai Serut. Lamaran tersebut ditolak oleh Ratu Agung Raja Sungai Serut sehingga menimbulkan perang. Dalam peristiwa tersebut, Anak Dalam, saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Raja Sungai Serut meneriakkan **Empang ka hulu-Empang ka hulu**: yang artinya hadang mereka (orang Aceh) jangan biarkan mereka menginjakkan kakinya di tanah kita. Dari kata tersebut lahirlah kata Bangkahulu atau Bengkulu. Bangsa Inggris menyebutkannya dengan Bencoolen.

2. Periode Perkembangan Agama Islam

Mengenai masuknya agama Islam ke wilayah Bengkulu ada banyak pendapat yang menyatakan diantaranya adalah pendapat bahwa Agama Islam diperkenalkan oleh para pedagang dari Aceh yang menyebarkannya sambil berdagang. Mereka sekaligus merupakan mubalig-mubalig yang andal. Pada masa itu pedagang-pedagang Aceh sudah mengembangkan perdagangannya di sepanjang pantai barat pulau Sumatera. Selain melalui mereka, penguasa Aceh **Yang Dipertuan Ali Mughayatsyah (1552 – 1570)** memang sedang berusaha mewujudkan ambisi untuk menjadikan Aceh Darussalam sebagai negara Islam yang besar, dan Bengkulu merupakan daerah yang sangat menarik karena hasil ladanya.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Sebab Aceh harus berhadapan dengan Portugis yang ketika itu menguasai Malaka. Ekspansi teritorial Aceh ke seluruh daerah pesisir Sumatera dimulai sejak zaman pemerintahan **Sultan Alauddin Riyatsyah al-Bahhar** dari tahun 1539 sampai tahun 1571 dan mencapai puncaknya pada periode **Sultan Iskandar Muda**. Meskipun kapal-kapal dagang Aceh sampai juga di Bengkulu, kekuasaan Kerajaan Aceh hanya sampai sebelah utara Teluk Ketahun (Menjuta). Sedangkan sebelah selatannya masuk dalam kekuasaan Kesultanan Banten.

Sampai di sini timbul persoalan baik bagi Sultan Banten maupun bagi Sultan Aceh. Kedua belah pihak tidak menghendaki terjadinya pertempuran di antara sesama negara Islam. Untuk itu Sultan Aceh mengambil inisiatif dengan mengirimkan misi diplomatik kepada Sultan Hasanuddin di Banten. Dari misi ini terjalin persahabatan dan perdamaian. Sultan Aceh bersedia mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi armada Portugis.

Bagi Sultan Banten, kekuasaannya atas Bengkulu memang mustahil dilepaskan karena selain terdorong oleh motivasi keagamaan, di Bengkulu terdapat sumber pendapatan yang berasal dari lada. Berkat penguasaannya atas Bengkulu, pada masa itu Banten menjadi bandar lada terbesar dan dikenal oleh pedagang-pedagang Eropa. Pada waktu Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten yaitu dari tahun 1651-1682, wakil-wakil Sultan di daerah Bengkulu membeli lada dari penduduk daerah **Rejang**.

Masuknya Kekuasaan Banten ke Bengkulu, tampaknya tidak terlalu banyak membawa pengaruh terhadap kehidupan pemerintahan di Bengkulu. Hal ini terjadi karena memang tidak adanya seorang wakil Banten ditempatkan di Bengkulu. Ketika itu, Banten hanya mengangkat wakil-wakilnya yang bergelar **jenang** di Lampung. Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa para jenang itu cukup berperan dalam kehidupan pemerintahan, kendati tak sampai mengubah struktur dan sistem pemerintahan yang ada. Para jenang itu, misalnya, cukup berperan dalam mengangkat kepala daerah dengan memberi mereka gelar pangeran, pasirah (datuk), depati, serta pemangku. Di sisi lain, para kepala yang diangkat itu, sekali setahun akan menyempatkan diri datang ke Banten untuk melakukan perjalanan mengatur bakti kepada Sultan Banten.

Pada masa itu, berdasarkan catatan sejarah, di wilayah Bengkulu terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang otonom, yaitu: Selebar, Sungai Serut, Empat Petulai, Indra Pura dan beberapa kerajaan lainnya. Kerajaan Selebar merupakan salah satu kerajaan di Bengkulu yang telah melakukan perdagangan hasil pertanian dan perkebunannya terutama rempah-rempahnya ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian antara Kerajaan Selebar dengan Perusahaan Inggris di Hindia Timur pada tanggal 12 Juli 1685. Dalam perjanjian itu disebutkan

bahwa Raja Selebar memberikan hak kepada Inggris untuk membangun gudang dan benteng. Perjanjian ini ditenggarai merupakan salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Selebar dan munculnya bangsa Eropa terutama Inggris dan Belanda di Bengkulu.

3. Periode Kolonialisme Bangsa Eropa

Keadaan ini baru berakhir sesudah Inggris masuk dan mendirikan benteng di Bengkulu. Inggris kemudian mengangkat **Kepala Suku Sungai Lemau** dan **Sungai Hitam** sebagai pangeran. Di samping itu, Inggris juga mendirikan sebuah benteng yang hingga sekarang masih berdiri, yakni **Benteng Marlborough**.

Tak hanya itu yang dilakukan Inggris di Bengkulu sepanjang masa kekuasaannya yang mencapai 150 tahun. Inggris juga mencoba melebarkan wilayah kekuasaannya hingga ke Muko-Muko. Bahkan, Bengkulu sendiri kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan Inggris di Indonesia setelah pengaruhnya di berbagai wilayah lain terdesak oleh Belanda. Namun demikian, sistem dan tata pemerintahan di Bengkulu praktis tak banyak berubah selama Inggris berkuasa. Dengan sistem pemerintahannya yang bersifat **indirect rule**, Inggris membiarkan rakyat Bengkulu memerintah sendiri. Inggris hanya mengatur untuk hal-hal yang sifatnya strategis dan menyangkut kebijakan dasar berkaitan dengan kepentingan Inggris. Pada zaman Inggris berkuasa di Bengkulu, kepala-kepala daerah disebut patih (depati).

Pada tahun 1712 Yoseph Collet diangkat menjadi Deputi Gubernur, ia meminta izin untuk menggantikan **Benteng York** dan membangun sebuah benteng baru di atas karang, sebuah bukit kecil yang menghadap ke laut sekitar 2 Km dari Benteng York. Pada tahun 1714 dimulailah pembangunannya dan selesai pada tahun 1718. Yoseph Colet menyebutnya **Benteng Malborough** yang merupakan **Duke Of Malborough** pertama yang diangkat menjadi pahlawan nasional setelah ia memenangkan sejumlah pertempuran melawan Perancis dan musuh-musuh lainnya.

Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles tahun 1818 – 1824 Bengkulu menjadi terkenal. Pada Tahun **1825** Inggris yang menguasai Bengkulu melakukan tukar menukar dengan Belanda yang menguasai Malaysia dan Singapura.

Kekuasaan Belanda secara **de facto** dimulai pada tahun 1825, yang secara **de jure** ditandai dengan ditandatanganinya Traktat London (17 Maret 1824). Traktat London berisi tentang pembagian kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Inggris mendapatkan tanah jajahan dari mulai Tumasik (Singapura), Johor ke utara yakni daerah Semenanjung Malaya hingga ke perbatasan Muangthai. Sementara itu, Belanda menguasai daerah Kepulauan Riau ke selatan termasuk Pulau Sumatera. Sebagai implikasinya, Bengkulu sebagai koloni Inggris ditukar dengan Malaka, koloni Belanda di Semenanjung Malaya.

Beralihnya Bengkulu dari Inggris ke Belanda pada bulan **April 1825** sesuai dengan **Traktat London (1824)**, dengan segera mengubah struktur dan tata pemerintahan yang sudah ada sebelumnya. Kecuali hanya mempertahankan sistem pemerintahan pada tingkat desa (marga) yang dipimpin seorang **pasirah**, seluruh struktur dan tata pemerintahan yang ada di Bengkulu praktis berubah ketika itu. Pada masa ini, sebutan patih (depati) yang sebelum-nya, kemudian dihapus dan diganti dengan gelar pangeran. Pangeran ini merupakan **primus inter pares** dari pasirah. Pada tahun 1838, Bengkulu mula-mula merupakan sebuah **afdeling** yang dibagi menjadi sembilan **onderafdeling**. Pembentukan **onderafdeling** ini, juga membawa dampak terhadap sistem pemerintahan, yakni ditandai dengan dihapusnya pangeran, dan hanya dikenal jabatan pasirah. Selanjutnya, pada tahun **1870** status **afdeling** untuk Bengkulu ditingkatkan menjadi daerah **karesidenan** di bawah pimpinan seorang residen yang ber-kedudukan di kota Bengkulu, dan dibantu oleh asisten residen, *controleur*, *sertagesaghebber*. Dibawahnya lagi, masih terdapat kalangan pangreh praja dengan susunan demang, pangeran, pasirah/datuk, depati, serta pemba-rap/pemangku.

Organisasi politik yang pertama berdiri di Bengkulu adalah **Sarekat Islam**. Organisasi ini berkembang pesat mulai tahun 1921 karena tujuan serta garis perjuangannya berdasarkan

ajaran Islam. Sebagian besar penduduk daerah Bengkulu adalah pemeluk agama Islam yang taat.

Ketika di Jawa muncul organisasi politik baru pada tahun 1927, yaitu **Partai Nasionalis Indonesia (PNI)**, sebagian masyarakat Bengkulu juga menyambutnya dengan hangat. Organisasi-organisasi lainnya pun segera masuk dan menancapkan pengaruhnya di Bengkulu. Gerakan politik di daerah ini menjadi lebih hidup setelah pemerintah Hindia Belanda menahan Bung Karno di sini dari tahun 1938 sampai 1942.

Di samping itu, muncul pula **Muhammadiyah** yang juga berkembang dengan pesat. Muhammadiyah di Bengkulu berdiri sekitar tahun 1926 dan pada mulanya dipelopori **Almaini** yang dikenal juga dengan nama **Bustanul Ichsan**. Setelah tahun 1929, tokoh-tokoh Muhammadiyah lain yang terkenal di antaranya adalah **H.Yunus Djamaluddin, A Kancil, Zainu Sailan, Napie, Hasan Din,** serta **Oei Tjing Hin**. Selain ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh-tokoh itu, Muhammadiyah juga memperlihatkan perkembangan yang bagus di Bengkulu dengan didirikannya sebuah gedung sebagai pusat kegiatan. Gedung tersebut terletak di Kebun Roos (sekarang Jl KH Achmad Dahlan), dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik.

Menyusul munculnya organisasi-organisasi besar tersebut, **Juni 1932** didirikan pula **Perhimpunan Siti Fatimah Zahara** bagian Jamiatulakhir cabang Bengkulu yang pada Agustus tahun yang sama memisahkan diri dari organisasi induknya. Adapun kegiatan organisasi ini terutama adalah menyelenggarakan pengajian serta tabligh umum yang berlangsung setiap hari Kamis untuk rumah sosial yang didirikan kaum dermawan dan tokoh-tokoh Islam Bengkulu yang bertempat di Kampung Bali. Dan, satu hal yang cukup menarik dalam kegiatan kaum perempuan ini di Bengkulu, kecuali yang diperlihatkan Perhimpunan Siti Fatimah Zahara, ternyata ada pula denyut kegiatan lainnya yang tak kalah pentingnya. Paling tidak hal ini terbukti ketika pada tanggal **27 September 1932** di **Clubhuis Jong Islamieten Bond Bengkulu** berlangsung rapat kaum gadis Bengkulu yang dipimpin **L. Lela, Rohani,** dan **M. Tjaja**. Tujuannya adalah mendirikan **Perkumpulan Gadis Der-**

mawan. Kemudian, pada tanggal **1 Desember 1931**, menyusul pula berdiri perkumpulan gadis-gadis Sukamerindu Bengkulu dengan ketua, sekretaris dan bendahara masing-masing **Encik Zainab, Zaleha, dan Upik Ros.** Tujuan perkumpulan ini adalah menolong terutama dengan uang yang anggotanya yang ingin menikah.

Di samping perkumpulan tersebut, di Bengkulu juga terdapat **Perhimpunan Al Ihsan, Perkumpulan Pemuda Islam, dan Kami Anak Muara Aman Asli (KAMA).** Sementara itu, **Jong Islamieten Bond** juga membuka cabang di Bengkulu. Sedang dalam tahun **1937**, di Bengkulu muncul pula **Parindra** yang dipimpin **Dr Sugiri, Riva'i Darwis, Zoelkifli Darsyah,** dan lain-lain. Kemudian, menjelang Jepang masuk, juga berdiri **Gerindo** yang dipimpin **MA Chanafiah.** Lalu, seiring dengan berkembangnya Muhammadiyah, di Bengkulu berdiri pula kependuan **Hizbul Wathon (HW).** **Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI)** juga berdiri di Bengkulu sejak berkembangnya **Taman Siswa** di daerah itu pada tahun **1937.** Kegiatan politik ini bahkan lebih semarak dan menghangat lagi tatkala pada tahun **1938-1942.** Tokoh utama pergerakan kemerdekaan Indonesia, **Ir Soekarno,** berada di Bengkulu sebagai tahanan Pemerintah Hindia Belanda. Dengan segala daya dan usaha, baik tokoh-tokoh pergerakan Bengkulu maupun Ir Soekarno sendiri berusaha saling men-dekati. Melalui organisasi kesenian dan olahraga pemuda-pemuda Bengkulu yang bernama **Monte Carlo,** Ir Soekarno menanamkan semangat kebangsaan. Hal ini kemudian menjadi modal yang sangat penting bagi rakyat Bengkulu dalam perjuangan melawan Jepang dan Belanda.

Pendudukan Jepang dan Revolusi Fisik

Kondisi politik Bengkulu yang sudah matang ketika itu tentu saja mem-perlancar masuknya pasukan Jepang. Pengusiran terhadap Belanda dilancarkan secara menyeluruh. Pejabat-pejabat Hindia Belanda yang tidak sem-pat melarikan diri ditawan.

Proses pematangan politik di Bengkulu juga melibatkan orang-orang Jepang. Jauh sebelum pasukannya diterjunkan, banyak orang Jepang membuka usaha di sini. Jelas mereka

bukan semata-mata pedagang atau usahawan biasa melainkan untuk memata-matai politikus Indonesia salah satunya adalah Ir. Soekarno

Sesuai dengan strategi militernya, Jepang segera membangun kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Bahkan setelah berkuasa mutlak atas seluruh Bengkulu, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membangun lapangan terbang Padang Panjang (Bengkulu Selatan) dan Talang Betutu (Palembang). Pembangunan fasilitas-fasilitas militer ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang diambil dalam dan luar kota. Banyak juga di antara mereka yang dijadikan **Romusha** dikirimkan secara paksa ke Pulau Enggano dan bahkan ke luar negeri.

Berita tentang kekalahan Jepang ini diketahui masyarakat Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 1945 melalui orang-orang yang bekerja pada kantor kawat Jepang. Mereka memonitor pengumuman Presiden **Truman** dan Perdana Menteri Atlee bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, yang kemudian disusul dengan pidato radio Kaisar Hirohito yang mengatakan bahwa "Jepang mengakhiri perlawanan".

Berbeda dengan berita tentang kekalahan Jepang yang cepat tersiar, berita tentang Proklamasi Kemerdekaan baru diterima untuk pertama kalinya di Bengkulu pada tanggal 3 September 1945. Itu pun melalui surat kabar **Palembang Shimbun**.

Masa Republik Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air dan dunia internasional. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, disusul dengan ditetapkannya UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah melahirkan sebuah NKRI.

Sementara itu **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)** dalam sidang pertamanya pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan antara lain:

1. Daerah Indonesia dibagi dalam delapan (8) provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.
2. Provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.
3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Pada hari ini juga PPKI menetapkan pembentukan departemen-departemen yang akan dipimpin oleh seorang menteri dan pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden.

Untuk melengkapi struktur pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan keadaan pemerintah pusat, maka pemerintah RI menetapkan **UU nomor 1 tahun 1945** yang mengatur kedudukan **Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)**. Dalam kerangka ini Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan melakukan pelimpahan tanggung jawab administratif semua urusan lokal pada KNID. Hal tersebut selain memperjelas pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh daerah-daerah bekas kerajaan yang menjadi daerah otonom.

Sebagai perangkat pembantu gubernur, KNID terutama berfungsi sebagai penghubung antara pusat dengan daerah, selain itu untuk membantu ketenteraman dan menjaga keselamatan rakyat, anggota KNID ikut aktif menyusun Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerahnya masing-masing. Badan ini terutama menampung mereka yang pernah mendapatkan pendidikan militer, seperti para mantan anggota Peta, Heiho dan KNIL.

Menyusul pengibaran sang Merah Putih di depan Kantor Pos Kota Bengkulu, para tokoh politik, pendidik, cerdik cendekiawan, wanita dan para anggota kelompok sosial lainnya bangkit bersama dalam se-angat untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Bendera Merah Putih secara resmi dikibarkan pada tanggal 11 Oktober 1945, menggantikan

bendera *Hinomaru* dan sekaligus mengakhiri kebingungan sebagian anggota masyarakat tentang kekuasaan Jepang.

Pengaruh *Syu Cokan* masih terasa kuat walaupun kekuasaan telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini tampak ketika **Ir. Indra Caya**, tokoh yang banyak berperan dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia **Karesidenan Bengkulu**, diangkat oleh Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai residen pada tanggal 3 Oktober 1945. Indra Caya tidak langsung menerima pengangkatan tersebut karena masih ingin meminta persetujuan *Syu Cokan*. Ketika itu dia hanya bersedia menjadi ketua Dewan Administrasi, yang merupakan hasil rekayasa Jepang. Masalah baru tuntas setelah Indra Caya mendapat banyak tekanan. Dia dilantik sebagai residen Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 1945.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, kehidupan rakyat di Bengkulu pada masa awal kemerdekaan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Keadaan ini merupakan akibat langsung dari aksi militer yang dilancarkan Belanda untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahannya.

Dalam aksi militernya yang pertama pada tahun 1946, Belanda tidak berhasil memasuki Bengkulu, yang menjadi pusat perlawanan untuk Pulau Sumatera. Namun dalam aksi militernya yang kedua pada awal tahun 1949, Belanda membumihanguskan Karesidenan Bengkulu dan kemudian mendudukinya hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dicapai pada akhir tahun itu.

C. Administrasi Pemerintahan dan Perkembangan Wilayah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika itu, sistem pemerintahan yang diberlakukan Belanda di Bengkulu adalah **rechtstreeks bestuursgebied**, yaitu pemerintahan langsung oleh Belanda. Dalam sistem ini, seluruh jenjang pemerintahan sepenuhnya dikuasai oleh Belanda dari urutan teratas hingga yang paling bawah. Sistem pemerintahan seperti ini, terus bertahan hingga Jepang masuk ke Bengkulu pada Juni 1942. Perubahan hanya terjadi pada nama dan istilah-istilah

yang digunakan. Nama karesidenan diubah menjadi **syu**, sementara residen menjadi **syucekan**. Selanjutnya, afdeling (kabupaten) diganti menjadi **bunsyu** dan dikepalai seorang **bunsyu**; *onderafdeling* yang dikepalai seorang *controleur*, diganti menjadi **gun** dan dikepalai seorang **gunce**, demikian seterusnya hingga tingkat paling rendah (marga) juga disesuaikan dengan sebutan Jepang.

Selanjutnya, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, struktur dan tata pemerintahan di Bengkulu tentunya-tak lepas dari struktur dan tata pemerintahan yang kemudian dianut oleh negara Indonesia yang telah merdeka. Didahului dengan **Keputusan Presiden tanggal 20 September 1945** yang menjadikan **Sumatera** sebuah provinsi dengan gubernurnya **Mr. Teuku Mohammad Hassan**, maka Provinsi Sumatera kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa karesidenan. Bengkulu ketika itu termasuk sebuah karesidenan yang di-pimpin seorang residen yang berkedudukan di kota Bengkulu. Status karesidenan untuk Bengkulu ini tetap bertahan ketika kemudian Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga sub-provinsi, yakni **Sub-Provinsi Sumatera Utara**, **Sub-Provinsi Sumatera Tengah**, serta **Sub-Provinsi Sumatera Selatan**, yang juga terbagi-bagi dalam beberapa keresiden. Bengkulu ketika itu masuk dalam Sub-Provinsi Sumatera Selatan bersama Karesidenan Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung. Ditingkatkannya status sub-provinsi tersebut menjadi provinsi, tidak banyak berpengaruh terhadap kedudukan Bengkulu yang tetap menjadi sebuah karesidenan dan termasuk dalam Provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga ketika tahun 1964 status karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi sebuah provinsi yang berdiri sendiri lepas dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu masih tetap berupa karesidenan. Namun demikian, tak urung, pembentukan Lampung menjadi sebuah provinsi, telah memancing makin mengentalnya gagasan untuk juga menjadikan Karesidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi. Sebetulnya, gagasan ini telah mulai ada ketika **Mr. Hazairin** menjadi residen di Bengkulu, yakni sekitar tahun 1946. Namun, karena situasi dan kondisi perjuangan yang sedemikian rupa ketika itu, gagasan tersebut sempat terlupakan. Gagasan itu

baru kembali ke permukaan secara lebih tegas setelah Lampung menjadi provinsi. Adapun yang menjadi dasar untuk berotonomi sebagai sebuah provinsi itu antara lain, pengalaman-pengalaman masa menunjukkan bahwa wilayah provinsi yang terlalu luas dapat menjadi batu penghalang bagi penyebarluasan usaha-usaha kemakmuran. Karena, wajarlah apabila Bengkulu lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Alasan berikutnya adalah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, putra-putra daerah yang cukup cakap, tentu memberikan kesempatan yang baik bagi Bengkulu untuk mengatur diri sendiri dengan menjadi Provinsi yang berotonomi penuh.

Demikianlah, usaha untuk menjadi Provinsi itu mulai dilakukan secara terorganisir sejak tanggal **29 Agustus 1962** melalui suatu kelompok yang disebut **Panitia Sembilan**. Pada mulanya, kegiatan kelompok ini masih tersembunyi dan rahasia. Namun, setelah dimuat dalam surat kabar **Trikora** yang terbit di Baturaja edisi **16 Desember 1962**, kegiatan itu akhirnya menjadi terbuka dan Panitia Sembilan kemudian berkembang menjadi **Badan Perjuangan Bengkulu**. Selanjutnya, tanggal **18 Desember 1962** diselenggarakan rapat umum di Gedung Nasional Bengkulu yang dihadiri 150 orang tokoh masyarakat. Menyusul rapat umum tersebut, dukungan demi dukungan terus mengalir dari DPRD-GR di kabupaten-kabupaten. Dari dukungan-dukungan itu, kemudian diselenggarakan Musyawarah DPRD-GR tingkat II se-Karesidenan Bengkulu pada tanggal **19-21 Desember 1963** yang secara aklamasi menyetujui usaha menjadikan Karesidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi.

Tanggal **15 Maret 1964**, di Bengkulu dilaksanakan kongres rakyat yang dihadiri unsur-unsur pemerintah daerah, DPRD-GR, partai politik, cendekiawan dan sarjana yang seluruhnya berjumlah 250 orang. Lewat kongres ini, tekad untuk menjadi provinsi semakin tegas. Tanggal 18 **Desember 1964**, sebuah delegasi yang dipimpin **A. Wahid** dikirim ke Jakarta. Tanggal **27 November 1965**, DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan mengadakan sidang yang ke-13. Dalam sidang ini didengarkan pidato **Adnan Ilyas** tentang keinginan Bengkulu menjadi sebuah provinsi. Setelah mendengarkan pemandangan umum para anggota, maka pada rapat paripurna II rapat ke-13 DPRD-GR Sumatera Selatan secara aklamasi menerima

keinginan rakyat daerah Bengkulu untuk menjadi provinsi. Menyusul persetujuan itu, suatu delegasi kemudian dikirim lagi ke Jakarta. Dan, setelah berbagai pertemuan, akhirnya berdasarkan **Undang-undang No. 9 tahun 1967**, yang pelaksanaannya dituangkan **dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968**, Bengkulu secara resmi menjadi sebuah provinsi. Peresmian Bengkulu menjadi provinsi berlangsung tanggal **18 November 1968** yang ditandai dengan pengangkatan **M. Ali Amin SH** sebagai pejabat gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal **4 November 1968 No. 43/M/1968**.

Dalam perkembangannya, sebagaimana yang tertuang dalam **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 1991** tanggal **28 Desember 1991** tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia, dalam pelaksanaan organisasi dan administrasi pemerintahan, di Bengkulu terdapat tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibukotanya Manna.
2. Kabupaten Bengkulu Utara dengan ibukotanya Argamakmur.
3. Kabupaten Rejanglebong dengan ibukotanya Curup.
4. Kotamadya Bengkulu dengan ibukotanya Bengkulu.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, saat ini Bengkulu mempunyai sembilan Kabupaten Daerah Tingkat II dan satu Kotamadya Daerah Tingkat II. Adapun kabupaten dan kotamadya daerah tingkat II yang ada di Propinsi Bengkulu tersebut adalah:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibukotanya Manna.
2. Kabupaten Bengkulu Utara dengan ibukotanya Argamakmur.
3. Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ibukotanya Karang Tinggi
4. Kabupaten Rejanglebong dengan ibukotanya Curup.
5. Kotamadya Bengkulu dengan ibukotanya Bengkulu.
6. Kabupaten Kaur dengan ibukotanya Bintuhan, Kaur Selatan
7. Kabupaten Kepahiang dengan ibukotanya Kepahiang
8. Kabupaten Lebong dengan ibukotanya Muara Aman
9. Kabupaten Mukomuko dengan ibukotanya Mukomuko

10. Kabupaten Seluma dengan ibukotanya Tais

D. Bengkulu dalam Khasanah Arsip

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa arsip yang akan diserahkan melalui program *Citra Daerah* ini adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI tentang berbagai aktifitas dan fenomena di Bengkulu. Arsip yang diserahkan berupa arsip tekstual, arsip peta dan arsip foto yang menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu kurun waktu abad 17 sampai dengan abad 20.

Dalam Citra Daerah Bengkulu ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai **Geografis**. Penjelasan wilayah geografis ini digambarkan melalui arsip Peta bagian Priangan antara lain : Sukapura, Galunggung, Limbangan, 16 Januari 1942, peta Priangan Barat tahun 1830, sketsa Cipanas Distrik Ciputri Kabupaten Cianjur Karesidenan Priangan, peta rencana Kota Bandung, peta daerah Cirebon, sketsa wilayah Puncak, dan juga peta Kota Bandung tahun 1946.

Masalah **Pemerintahan** dituangkan pertama kali dengan menampilkan arsip berupa Akta Perjanjian Nomor 6 tahun 1699 tentang Mufakat Raja-raja Cirebon, Daftar silsilah Raja-raja Cirebon tahun 1765, fragmen catatan harian perjalanan di Jawa dalam misi pendakian ke Gunung Ciremai tahun 1805, Akta Perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan Sultan Kasepuhan dan Sultan Anom dari Cirebon tentang pengakuan kekuasaan Belanda atas negeri Cirebon tahun 1806, interogasi Belanda terhadap Bagus Manoch dan Bagus Rangin pejuang rakyat Cirebon 1812, daftar silsilah keturunan bupati sampai mantri polisi di Karawang dan Priangan tahun 1854, notulen rapat daerah Cirebon tentang anggaran Cirebon tahun 1914, permohonan tentang rekonstruksi Pemerintahan Karesidenan Cirebon sehubungan dengan reorganisasi pemerintahan Hindia Belanda 1923, notulen *besluit* no. 5 tahun 1925 tanggal 6 September 1925 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, program kerja Provinsi Bengkulu di bidang pendidikan, pertanian, peternakan, kesehatan tahun 1926, laporan hasil pembentukan pemerintahan di Bengkulu 1926. Selain itu ditampilkan juga foto tentang gedung tempat dilangsungkannya perundingan Linggarjati di Kuningan Cirebon 1946, upacara

penandatanganan perjanjian Linggarjati oleh PM Sutan Syahrir 1947, juga arsip Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947, laporan singkat rapat pembentukan PPN di Majalengka dan anggaran dasarnya tahun 1947, permohonan pembentukan Daerah Istimewa Karesidenan Cirebon 1948, proses verbal sumpah Wali Negara Pasundan Adipati Arya Wiranatakusumah 1948, mosi kepada pemerintah Negara Pasundan supaya Negara Pasundan diakui sah oleh RI 1948, surat tentang desakan pembentukan Karesidenan Purwakarta, Keputusan Presiden RI no. 112 tahun 1951 tentang pengangkatan T. Mohamad Sanusi Hardjadinata (*Sic.*), Residen Priangan menjadi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bengkulu, R. Mohamad Sanusi Hardjadinata sedang diambil sumpahnya dalam pelantikan sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu, Bandung, 1 Juli 1951, foto-foto Gubernur Bengkulu, foto tentang perjalanan Presiden Soekarno ke Tasikmalaya Juli 1951, Keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 1952 tentang Pengesahan Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Bengkulu 13 Februari 1952, Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 1954 tentang Pengesahan Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu tanggal 22 September 1953 nomor 13/K/53 yang berisi daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai 29 Januari 1954, Sokongan dari Serikat Buruh PU Cabang Soreang terhadap pernyataan SOBSI Bengkulu tentang pengoperan Jawa tan Pekerjaan Umum oleh Daerah Otonom Provinsi Bengkulu 8 Maret 1954, Keputusan Presiden RI No 216 tahun 1954 tentang Penggunaan Lambang Kota Sukabumi, 30 Oktober 1954, Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1956 tentang Pengesahan Keputusan DPRDS Provinsi Bengkulu tanggal 5 Juli 1955 Nomor 26/K/55 yang menetapkan pemakaian mutatis-muntadis bagi pegawai dan pemberian tunjangan cacat bagi pegawai negeri sipil, 21 Februari 1956, Keputusan Presiden Nomor 99 tahun 1958 tentang Pengesahan Peraturan Daerah TK II Majalengka tanggal 3 Oktober 1957 nomor 15 yang berisi Peraturan Pajak Tontonan Kabupaten Majalengka 6 Mei 1958, Keputusan Presiden RI Nomor 134 Tahun 1958 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra TK II Cianjur tanggal 23 Juli 1957 yang berisi Peraturan Pungutan Pajak, 2 Juli 1958, serta pidato Presiden Soekarno

pada rapat raksasa di Bandung dalam rangka menyambut Presiden Filipina Diosdado Macapagal, 24 Februari 1964.

Masalah **Politik dan Keamanan** diawali dengan menampilkan Pembakaran Kota Bandung yang kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api, 24 Maret 1946, Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946 Mochamad Toha tokoh yang juga dikenal sebagai Pahlawan Bandung Selatan, Berita Peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946, arsip tentang laporan keadaan keamanan di daerah Dayeuh Kolot 21 Mei 1947, Laporan keadaan daerah Subang, Bengkulu akibat agresi Militer I, Juli 1947, peristiwa Agresi Militer Belanda I di Bengkulu 12 Juli 1947, kunjungan Soekarno dan M. Hatta ke Cirebon yang disambut dengan penghormatan militer dan defile pada 16 Juni 1947, Suasana Kota Bandung Pasca Agresi Militer I, 1947Laporan tentang pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Siliwangi terhadap Sub Teritorial Comando di Jogja, 13 Desember 1948.,Anggota TNI dari Divisi Siliwangi berkumpul di Cicalengka, Bandung untuk hijrah ke Jogja, 1948Pasukan TNI dari Siliwangi, Brigade Suryakencana, Batalion Sujono di Sukanegara menjelang hijrah ke Jogja,1948.Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin memasuki Kota Bandung menjelang pengakuan kedaulatan RI, 1949surat rakyat Cibusah kepada Presiden Soekarno tentang permohonan pengiriman TNI Siliwangi untuk menjaga keamanan 18 Juni 1950, memorandum mengenai acara Konferensi Bogor 8 Desember 1954, foto PM India Shri Jawa harlal Nehru, PM. Birma bertemu Presiden Soekarno dalam rangka Konferensi Panca Negara di Istana Bogor 27 Desember 1954, arsip tentang laporan singkat pada *Session* I Konferensi 5 perdana menteri di Bogor 28 Desember 1954, Konferensi Pancanegara di Bogor 29 Desember 1954, naskah kerja delegasi RI pada Konferensi Asia Afrika di Bandung 18– 23 April 1955, Dasasila Bandung merupakan hasil rumusan Konferensi Asia Afrika PM RI Mr. Ali Sastroamijoyo menyambut kedatangan Sir John Kotelawata dari Srilangka di Bandung 1955, pemandangan pada sidang Pleno Konferensi Asia Afrika (KAA) Gedung Dwi Warna tempat Sidang- sidang Ekonomi, Politik, Kebudayaan pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan, Bandung, 20 April 1955, Hotel Preanger dan Hotel Savoy Homan di Jalan Asia Afrika tempat penginapan Delegasi

peserta Konferensi Asia Afrika, Bandung, 20 April 1955, kegiatan sidang pleno pada Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 3 Juni 1956, pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Dewan Solidaritas Asia Afrika di Bandung 10 April 1961, Gubernur Bengkulu Ipi Gandamana sedang memasukkan suaranya pada pemungutan suara untuk DPRD Bengkulu Agustus 1957, Presiden Soekarno menerima emblem Batalyon Infantri 330 TT III Siliwangi 21 Mei 1958, Raja Keprabonan sedang memberikan suara pada pemungutan suara ke II kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante di Bandung, 1 Juni 1959, pidato Presiden Soekarno pada Musyawarah Nasional Perdamaian di Bandung 25 Januari 1960 serta Amanat Presiden Soekarno pada upacara pemberian "Sam Karya Anugerah Kepresiden" kepada Kodam Siliwangi Bandung 28 Agustus 1965.

Kegiatan **Perekonomian dan Perindustrian** lebih banyak tergambar melalui arsip foto, antara lain foto Pembangunan gedung baru Javasche Bank di Bandung, 21 Mei 1915, Gedung Javasche Bank di Bandung, 1920, pekerja wanita sedang memintal benang pada perusahaan "Yo Sek In" di Bandung pada Maret 1946, Bagian pemintalan dengan mesin kelos bersilang di pabrik tenun Bandung, 23 Mei 1952, Para pekerja sedang membuat hiasan payung di Tasikmalaya, 28 Juni 1948, Seorang pekerja wanita sedang membuat keramik pada perusahaan keramik di Plered, 12 Februari 1953, Pemandangan pedagang yang sedang berjualan di depan pasar Depok, 11 Juni 1949, Pembangunan Pasar Pengalengan hasil gotong royong rakyat desa Pengalengan, Bandung, 25 Agustus 1958, pembuatan tikar mendong dengan alat-alat penganyam yang dikerjakan dengan tangan pada perusahaan rumput mendong di Tasikmalaya 1952, Para pekerja sedang membatik di Koperasi "Mitra Batik" Tasikmalaya, 14 Maret 1956, Perusahaan sepatu "Persebo" di Bogor, 14 Juni 1951, Pembuatan sikat dari ijuk hasil produksi industri "Sikat Indonesia" di desa Cisaat, Sukabumi 1955/ 1956, gambaran aktivitas di pabrik ban "Good Year" di Bogor 1953, Kunjungan Wakil Presiden M. Hatta didampingi Ketua Koperasi Pegawai Negeri, Hasan Wirawatna memasuki gedung KPN, Bandung, 7 September 1956, Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1956 tentang pengiriman suatu delegasi

Indonesia untuk menghadiri Konferensi FAO Regional untuk negara-negara Asia dan Timur Jauh di Bandung , 15 Oktober 1956, Anggota FAO diterima Gubernur Bengkulu R. Mohammad Sanusi Hardjadinata, 1956, Wakil Presiden M. Hatta mengunjungi koperasi Perusahaan Rotan di Cirebon dan Perusahaan Tembaga di Panyingkiran, Majalengka, 25 Juli 1956, Pemandangan di pabrik tekstil Majalaya, Bandung, 18 September 1963, Surat Keputusan Dirjen Perindustrian Kimia tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Penyehatan Managerial PN. Kertas Padalarang, 29 Agustus 1974, dan Keputusan Kepala Pusat Perindustrian tentang penempatan Pejabat-pejabat dalam lingkungan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) di Pangkalan Angkatan Udara Utama Husein Sastranegara Bandung 1971. Perkembangan sektor **Pertanian dan Peternakan** digambarkan dalam arsip antara lain tentang kalkulasi hasil perkebunan kopi di Karesidenan Priangan pada tanggal 18 Januari 1861, Laporan kerusakan 450 pohon kopi akibat serangan kumbang tanah di Banjaran, Bandung, 16 Maret 1891, besluit tanggal 17 Oktober 1911 nomor 55 tentang penyuluhan penanaman teh di Karesidenan Priangan, nota perjanjian antara organisasi pertanian dengan penduduk tentang penyerahan bagi hasil pertanian dan penelitian di bidang pertanian 1923, Pemberitahuan pembebasan tanah untuk pertanian agroponik di Karesidenan Priangan 1940, Seorang pekerja sedang menebang Pohon Kina, Bandung, 8 september 1949, seorang pekerja perempuan sedang memetik daun teh di perkebunan Gunung Mas Puncak 1951, Bunga teratai di Kebon Raya Bogor 1951, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam bidang perikanan darat kepada Provinsi Bengkulu, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang pertanian kepada Provinsi Bengkulu, 27 Juni 1951, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1951 tentang Pelaksanaan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam bidang kehewan (ternak) kepada Provinsi Bengkulu, Bunga bangkai di Kebun Raya Bogor, 28 Juli 1952, Kebun Sayur Kol di Lembang tahun 1965, Petani sedang menanam padi di sawah, Depok, 26

November 1952, dan Wakil Presiden M. Hatta didampingi Menteri Pertanian Moh. Sardjan meninjau Balai Penyelidikan Karet di Bogor, 1 Agustus 1952.

Kegiatan **Pendidikan** dapat dilihat pada arsip kertas maupun foto antara lain menampilkan foto Pelajaran pertama di dalam kelas Sekolah Kartini di Bandung, Sekolah Internasional "Taman Siswa" Mr. Soerjo Adipoetra khusus perempuan di Bandung, Sekolah swasta pribumi di Bogor, *Besluit* No. 31 tanggal 16 Februari 1921 tentang perluasan bangunan Technische Hooge School dengan biaya 22.000 Gulden, 16 Februari 1921, *Besluit* No. 29 tanggal 11 April 1921 tentang pengembangan jurusan Teknik Kimia di Technische Hooge School, 11 April 1921, Peraturan yang menetapkan Technische Hooge School untuk memberikan gelar insinyur kepada lulusannya, pengangkatan Ketua ITB oleh Gubernur Jenderal, pengangkatan dosen-dosen oleh Minister *van Kolonie* serta rincian pengajiannya, 11 April 1921, para mahasiswa Sekolah Pertanian Atas Bogor sedang berpraktek tanaman pinus 14 Mei 1949, Mahasiswa Technische Hooge School sedang mengukur kejernihan langit di Bandung 1949, Technische Hooge School 1949, Boscha (Gedung Peneropongan Bintang) di Lembang, 15 April 1950, Alat Teropong Bintang (Boscha) Lembang Bandung 1951, Presiden Soekarno sedang mengunjungi Sekolah Kader di Cimahi 1951, Siswa Polisi Wanita yang sedang belajar di Sekolah Polisi Sukabumi 1951, Peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian oleh Presiden Soekarno, Bogor, 27 April 1952, Peletakan batu pertama pembangunan gedung Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro, Bandung, 27 Juli 1952, Siswa Penerbang Akademi Penerbangan Indonesia sedang bersiap mengadakan demonstrasi terbang di Curug 1955, Presiden Universitas Negeri Padjajaran menyerahkan surat pengesahan kepada Dewan Mahasiswa Sdr Abdul Djabar pada pelantikan Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Padjajaran, Bandung 30 Desember 1957, Gedung Universitas Negeri Padjajaran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung, 6 November 1958, Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pembukaan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung 1959, Amanat Presiden Soekarno pada peringatan Dies Natalis ke II Universitas Padjajaran, 10 Oktober 1959, Penganugerahan

Gelar Doktor *Honoris Causa* dari ITB kepada Presiden Soekarno tahun 1962, Pidato Presiden Soekarno pada pemancangan tiang pertama gedung Herbarium di Bogor, 19 Agustus 1963, dan Sambutan Roeslan Abdulgani selaku wakil Ketua Badan Pembantu IKIP di Bandung tentang perlunya mahasiswa dalam persoalan revolusi, 17 Maret 1964.

Masalah **Kesehatan** diawali dengan menampilkan arsip tentang, Pembangunan gedung rehabilitasi epidemi di daerah Sukabumi, epidemi tersebut sedang diteliti oleh Institut Pasteur, Bandung, 28 Mei 1915, kemudian foto Sanatorium Cisarua Bengkulu 1947, Gedung Institut Pasteur Bandung, 21 Agustus 1949, Presiden Soekarno mengunjungi PMI dalam rangka Kongres PMI ke V di Bogor 1951, Konferensi WHO di Bandung, 9 Oktober 1956, , Gedung Balai Pengobatan Penyakit Kusta di desa Kedaung Bekasi 1957, dan surat Izin pendirian Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A Habibie, November 1991- September 1995.

Pembangunan **Infrastruktur** digambarkan melalui berbagai corak arsip kertas maupun arsip foto seperti Denah bangunan *Algemeene Secretarie* Bogor, surat-surat tentang penunjukkan daerah Kedung Halang Bogor untuk digunakan sebagai Laboratorium percobaan di bidang pertanian dan peternakan, kedokteran hewan 29 Oktober 1938, salinan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang perluasan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu 21 Juli 1941, Jembatan di atas Kali Ciliwung, Puncak, 10 Juli 1949, Gedung Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (ITB), Bandung, 8 Juli 1953, , Istana Bogor, tempat pemerintahan Gubernur Jenderal, Istana Cipanas, tempat peristirahatan Gubernur Jenderal, Jembatan gantung sepanjang 40 meter di Bekasi, 14 Oktober 1957, Pembangunan kembali jembatan Leuwisapi (Daerah Nanjung) yang menghubungkan antara Cimahi dan Soreang, Bandung, 15 November 1958, Gedung "Merdeka" Tempat Pemungutan Suara ke II kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante Bandung 1959.

Pembangunan sarana **Irigasi** dapat dilihat dari Denah saluran air ledeng yang berasal dari rawa Cibinong 29 Januari 1801, pusat Tenaga Air di Lumajang Bandung Selatan tahun 1949, Proyek pembangunan Waduk serba guna Jatiluhur 18 April

1965, dan Amanat Presiden Soekarno pada waktu mengunjungi Proyek Waduk Serba Guna Jatiluhur di Purwakarta 19 September 1965.

Usaha **Pertambangan** tidak begitu banyak diungkapkan karena arsip yang ada terbatas, sehingga hanya sedikit yang dapat ditampilkan antara lain Resolusi untuk memutuskan pemerintah pusat Cq. Kementerian Perindustrian agar segera mengusahakan penggalian sumber-sumber minyak tanah di daerah Indramayu pada tanggal 10 September 1957 dan tentang pidato Presiden Soekarno pada pembukaan tambang emas di Cikotok Sukabumi pada tanggal 12 Juli 1958.

Perkembangan jaringan **Transportasi** digambarkan melalui Grafik tentang biaya pekerjaan stasiun kereta api jalur Priangan- Cilacap, 1890, arsip-arsip foto seperti Kereta Api sedang langsir di Stasiun Bandung 1952, Stasiun Kereta Api Bandung, 27 Juli 1953, Stasiun Kereta Api di Cirebon, 15 November 1953, pesawat terbang Garuda Indonesia Airways sedang mendarat di lapangan terbang Andir Bandung pada tanggal 10 September 1949, Model angkutan Becak sebagai salah satu alat transportasi di kota Bandung 1953, Pemandangan di sekitar pelabuhan Cirebon dimana terlihat pangkalan kapal-kapal penarik sampan tempat kapal berlabuh 1953, Nota Kepala Dinas Interlokal tentang Organisasi Dinas Interlokal, 15 Mei 1925, Surat tentang perluasan gedung Kantor Pos Besar di Bandung, lampiran denah, 9 Oktober 1931, Kantor Pos Besar di Bandung, 27 Juli 1953, Kantor Pos dan Telepon di Bandung, 27 Juli 1953, Penyederhanaan Organisasi Post, Telegraaf dan Telefoon (PTT), 6 September 1935, dan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, 4 September 1984

Kegiatan **Keagamaan** digambarkan melalui foto-foto tempat peribadatan yang tersebar di berbagai tempat, seperti foto gereja di Depok tahun 1949, Gereja Katolik Roma di Bandung tahun 1953, Gereja Protestan Bandung 1953, Masjid Agung Sukabumi 1952, Masjid Kanoman Cirebon 1953, dan Masjid Agung Bandung 1957. Selain itu terdapat foto Presiden Soekarno sedang melaksanakan Sholat Idul Adha di Alun-alun Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 1952, Perayaan hari Whu Chang oleh bangsa Tionghoa golongan Kuo Min Tang di

Bandung, 10 Oktober 1953 dan kegiatan Renungan tahun baru 1990 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kabupaten Kuningan Bengkulu yang dilakukan oleh 80 orang anggota pemuda Hindu Indonesia Provinsi Bengkulu .

Aktivitas **Kebudayaan dan Olahraga** lebih banyak ditampilkan dalam bentuk foto antara lain seperti foto tentang pertunjukan Tari Kelana Sunda Bandung 1950, Orkes Angklung yang diselenggarakan oleh Badan Kesenian Indonesia 1 Februari 1951, Tari Wayang Sunda yang sedang diperagakan untuk menghibur tamu 1951, batu tulis di Bengkulu 1952, Rombongan "Panjang Jimat" dari Kraton Kanoman menuju Masjid Agung, Cirebon, 19 Oktober 1953, Pertunjukan Wayang Kulit pada upacara Lumban untuk menghormati Dewa Laut di pesisir, Cirebon, 14 November 1953 Gua Sunyaragi bekas peristirahatan Putri Tiongkok istri Sultan Cirebon di abad XVI (1570), Cirebon, 20 November 1953, seperangkat gamelan sunda untuk mengiringi pertunjukan tari di Gubernuran Bandung 1955, Wayang Golek yang merupakan salah satu ciri khas kesenian Bengkulu, 20 Mei 1955, naskah Pidato Presiden Soekarno pada upacara pembukaan PON V di Bandung 30 September 1961, Kontingen Bengkulu (paling kanan) dalam upacara pembukaan PON ke V di Bandung, 30 September 1961, Regu Basket Putri Kontingen Bengkulu berfoto sebelum bertanding pada PON V, 1 Oktober 1961, dan berkas Pendaftaran benda antik berusia 50 tahun bernama "Piring Cupang Sandang" disertai gambar, 23 Desember 1976. .

Tentang keadaan **Lingkungan Hidup dan Pesona Alam** juga banyak digambarkan melalui foto seperti pemandangan Kawah Kamojang di Garut tahun 1949, Pemandian Salabintana Sukabumi 1950, Gunung Tangkuban Perahu sedang mengeluarkan lahar panas di Lembang 1950, Pemandangan di dalam Kebun Raya Bogor tanggal 27 Mei 1951, Pemandangan air terjun Maribaya Bandung 1958, Laporan Asisten Residen Bogor tentang banjir Kali Ciliwung yang menghancurkan bendungan dan rumah-rumah, 1895, tanggul Kali Cimanuk di Desa Panjindangan Wetan Kecamatan Sindang, Indramayu yang hancur diterjang air bah pada tanggal 14 Desember 1957, Rumah-rumah penduduk di Desa Panjindangan Wetan Kecamatan Sindang, Indramayu yang runtuh akibat banjir di kali

Cimanuk 1957, Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Umum Pemberian Hadiah atas kemenangan Kota Garut sebagai Juara Pertama dalam Lomba Kebersihan Kota pada tanggal 16 Desember 1960 serta pada bagian akhir ditampilkan Bencana alam tanah longsor akibat hujan yang terus menerus di Sukabumi, 19 Januari 1965

DAFTAR PUSTAKA

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. *Profil Provinsi Republik Indonesia : Bengkulu*. Jakarta, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Imperialisme dan Kolonialisme di Bengkulu

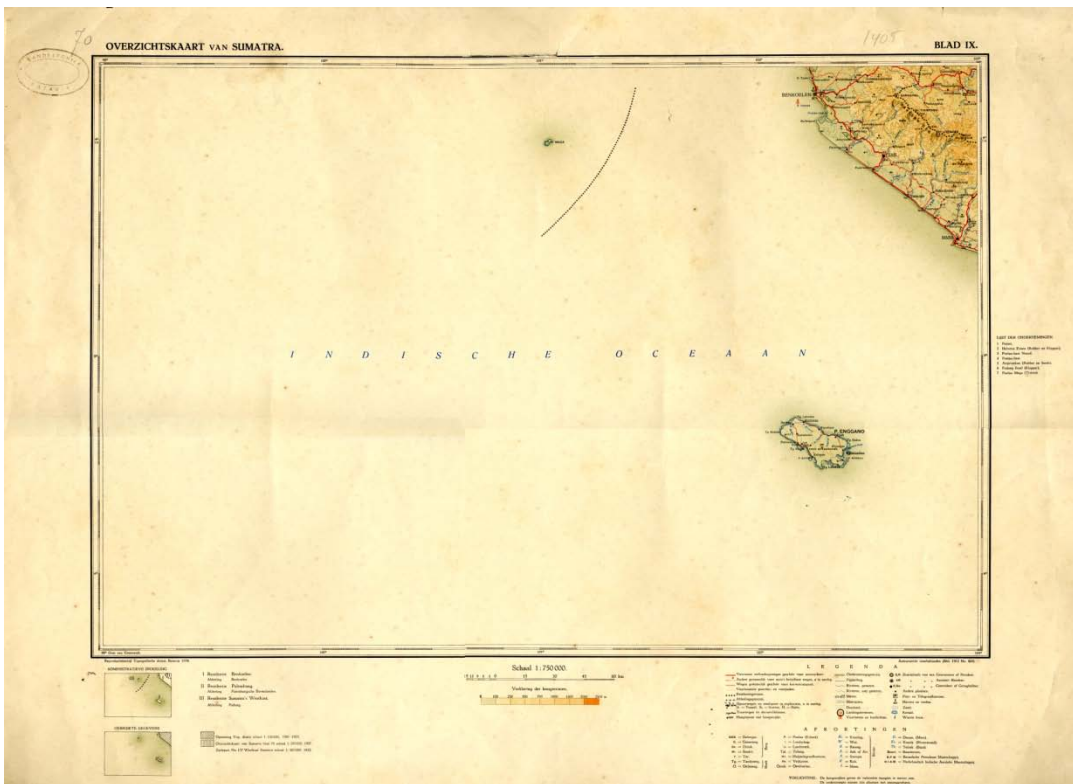
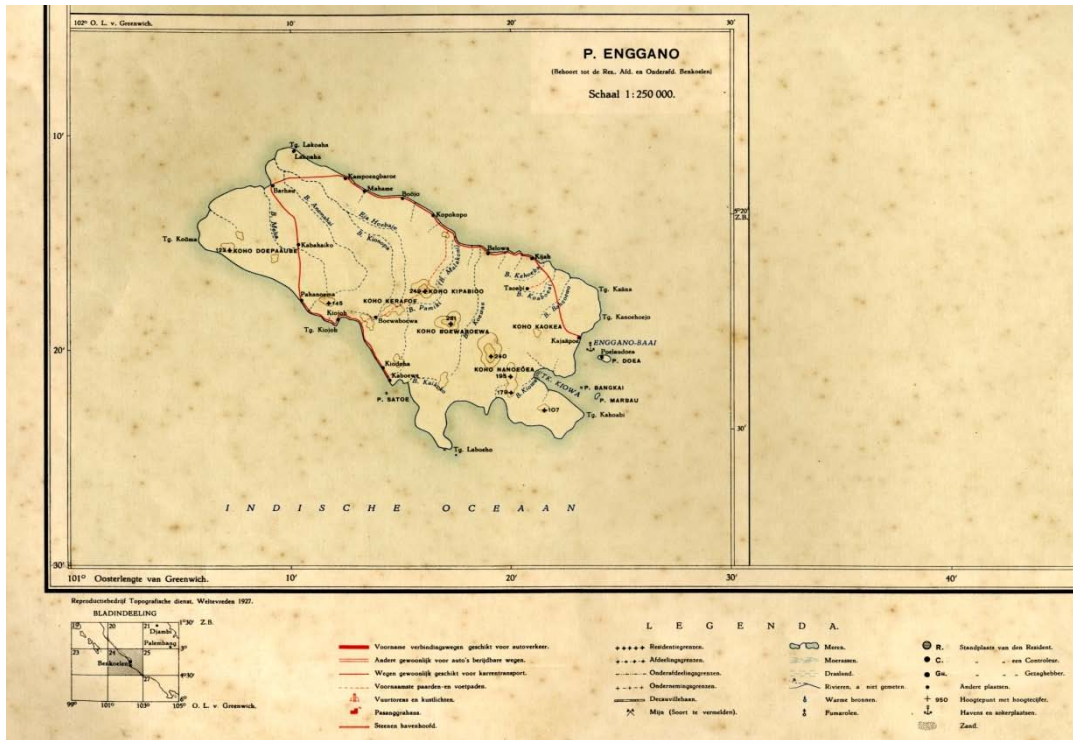
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Sosial di Bengkulu

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional di Bengkulu

www.wikipedia.org

www.bengkuluprov.go.id

Geografi

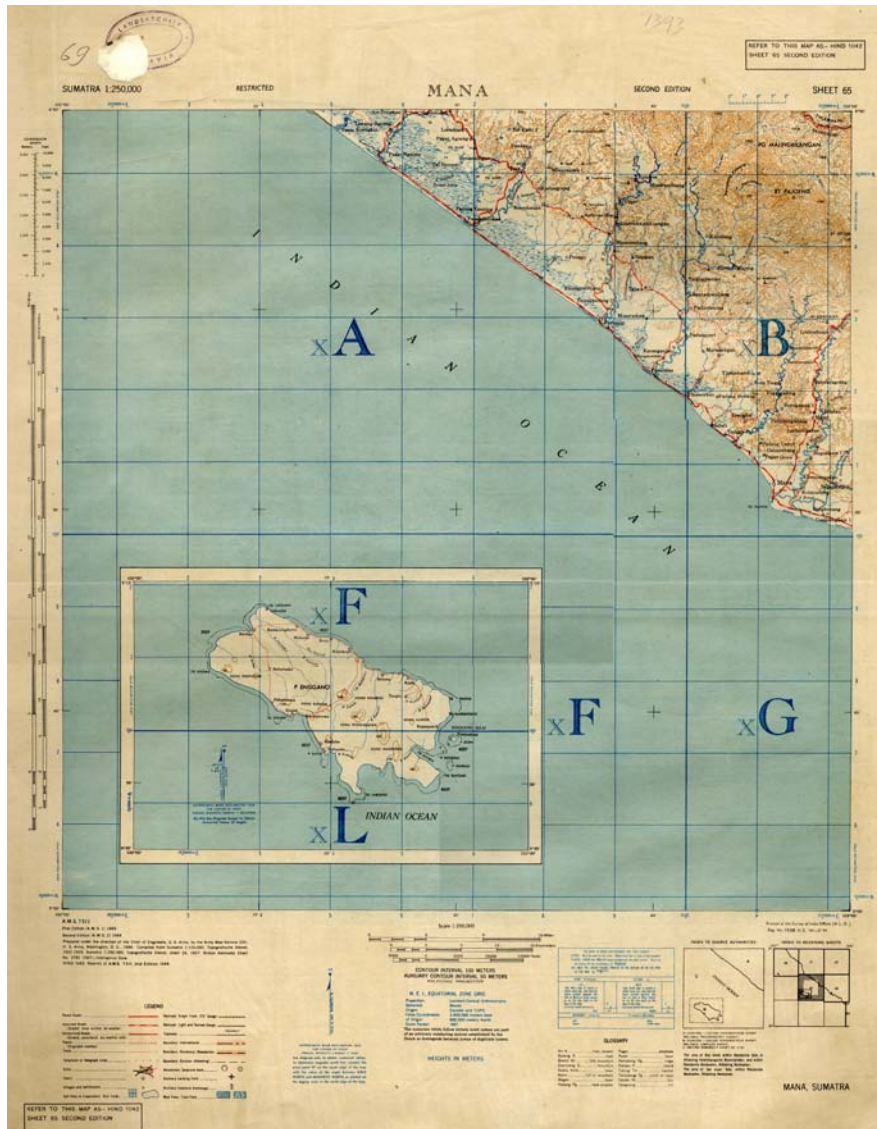


Peta topografis Pulau Enggano, Bengkulu dan wilayah sekitarnya
1927

ANRI: Dinas Topografi 1326 dan 1405

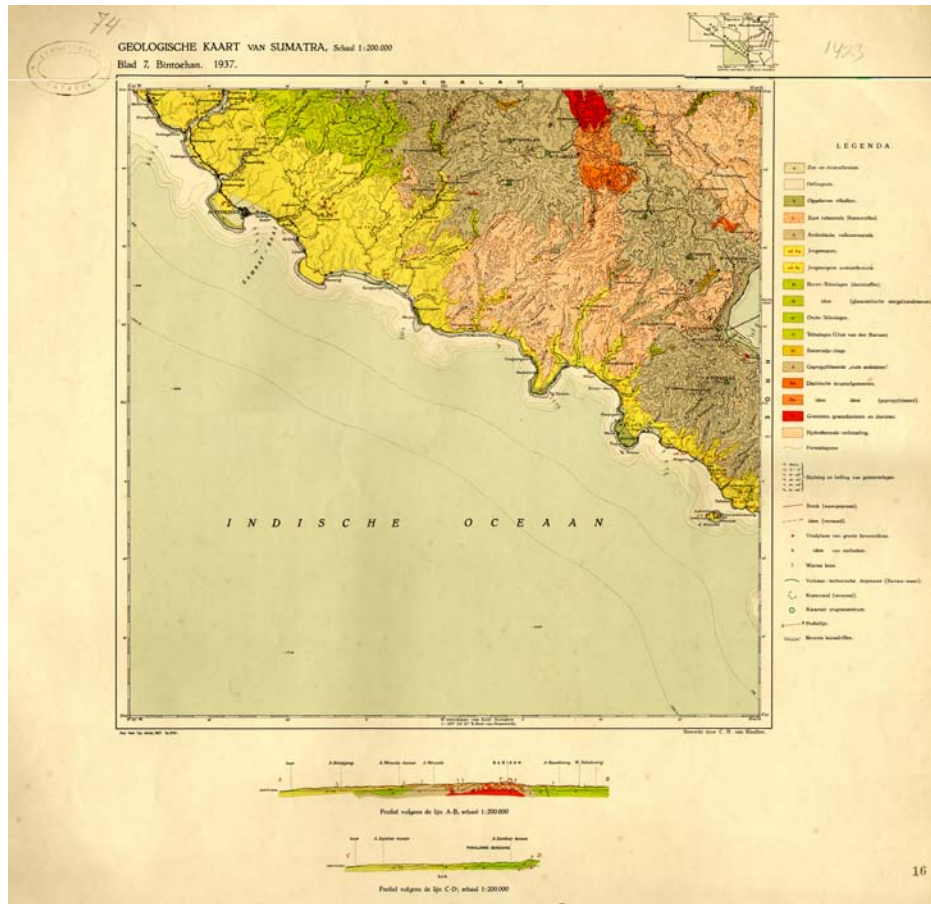


Peta topografis wilayah Seblat dan Pegunungan Lalang Lebar, Bengkulu dan sekitarnya (Air Rami, Arah Bubus, Talang Sekah, Lubuk Mindai),
1944
ANRI: Dinas Topografi 1388

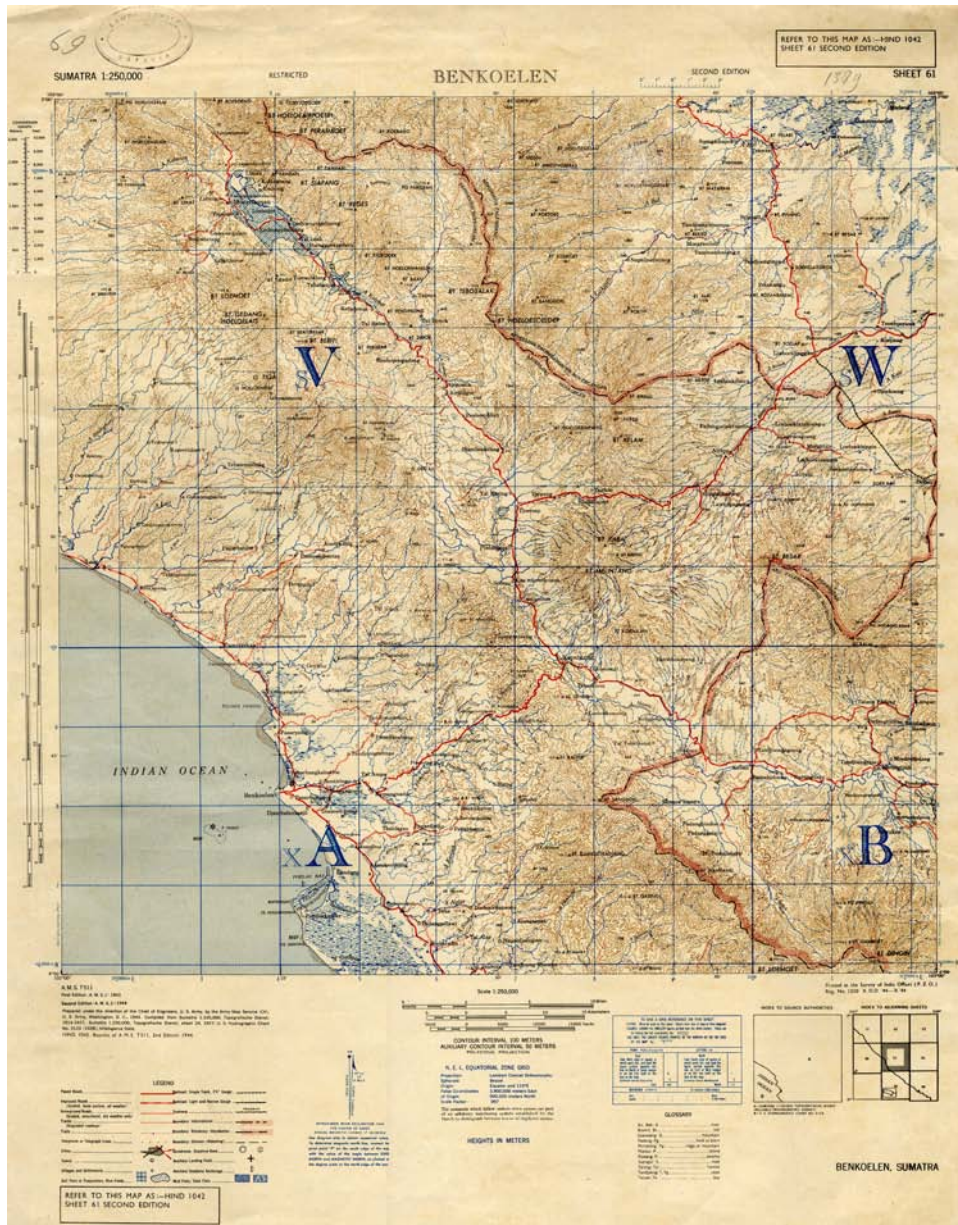


Peta topografis wilayah Mana dan sekitarnya (Bengkenang, Ketapang, Gunungsakti, Pagar Dewa), Bengkulu 1944

ANRI: Dinas Topografi 1393



Peta geologis wilayah Bintuhan dan sekitarnya (Padang Langkap, Kepahiang, Kedataran, Talang Besar),
 1944
 ANRI: Dinas Topografi 1423



Peta topografi Benkoelen (Bengkulu),
1944
ANRI : Dinas Topografi 1389



Peta Provinsi Bengkulu,
2005

ANRI : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Politik dan Pemerintahan

Westkust Sumatra sith
Juli 1826

H. D. Steurs

Als een uitslag van het Raaysood
nogens de overname van het Land Barbo
rough of de Residenten Berboeoe en
ommedelyke Onderhoorigheden geresultant
d. 22 April 1826. La B. 1826 hebben wij
eer door eigen Voorb. Excellencie een over-
zicht aan te bidden van een Staat dier Landen
op het tegenwoordige tydstip de Wyze van
Administratie tot ons ziele met het Britsche
Bestuur, en den voet waerby wij verbidde
verstellen dat het behoeven eigen Handvater
voor den vervolge worden geregeld.

De Staat van het Land of dierzelfs
bevolking in het algemeen is reestig, of dan
het meijstlyk te bepalen is welke de werkelijck
geestgeheleheid zij, enlyk is de natuurelyke
gonganghien van het volck, tot personelle
wraakneming, zoo met negens ingehelot
als werkelijck beledigingen van eenen re-
deligen invloed op de publike veiligheid
en is het Etablissement dier Politie steeds
ontersienend bevonden om de misdadigers
uit te vanden

Han Dyne Excellencie
den Heere Secretaris van Staat
Gouverneur Generaal
enij onij
Batavia

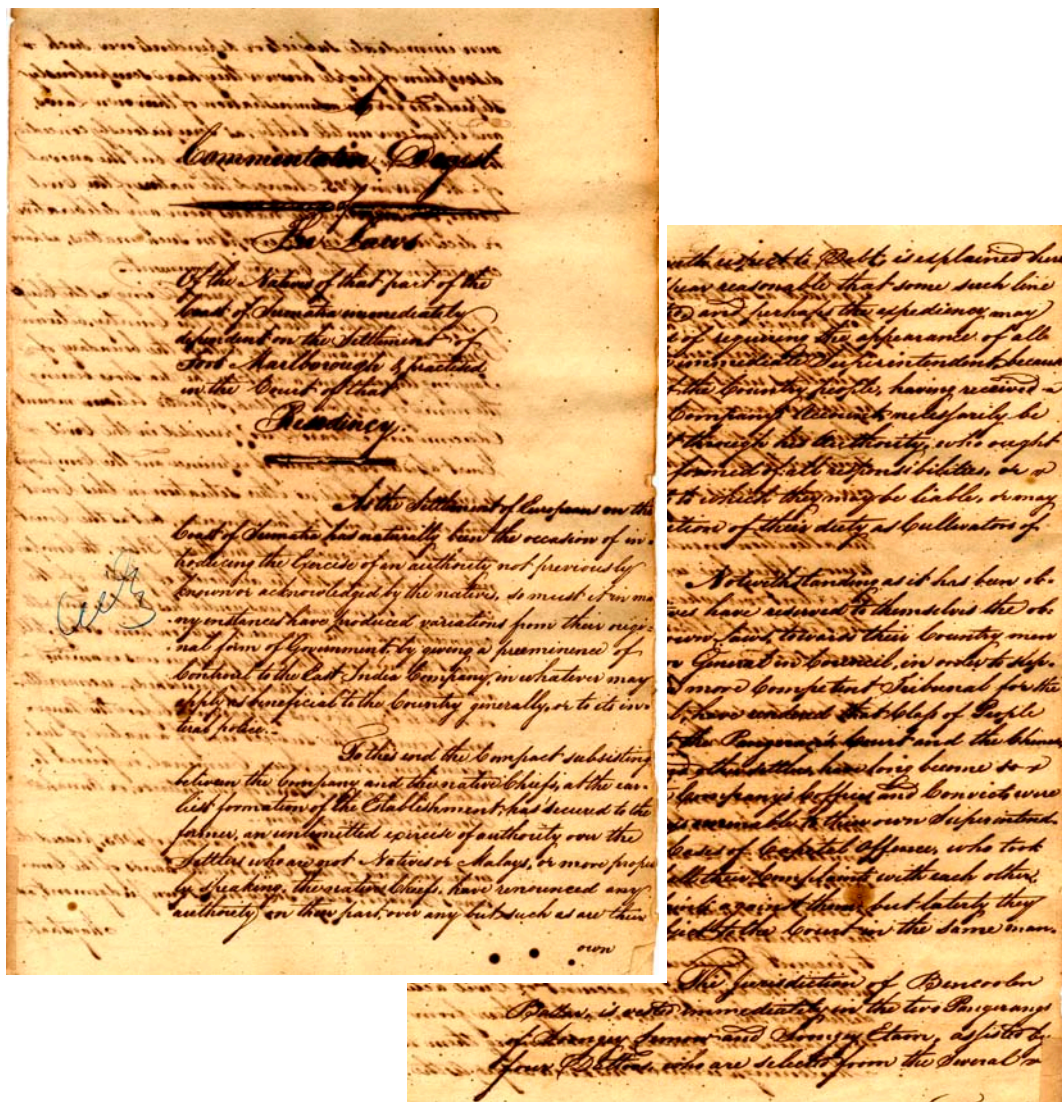
ende van de, dat minen den het draad geest
aanvlechte, en beambten tegen te gaan.
Hij anken hier niet aadlyt op het ge-
bureu, en te ongen stants gebouwen is eenheden
tyden, maar bepaaldelyk wat de overreiking
aancontract, twee knuffe gelyken, idere het
tydstip den overname.

Onder de ongenen waerby Staat gelyken
konden zij tydstip, misten zijn en vollegt in
dierzelfs gelyken enlyk, welke van gen in de
lyk niet voor het tegenwoordig oegment enden
negens, gonganghien te deuce zeggen, dat de kon-
tracten der bevolking en meer bepaaldelyk
de erte knuffen en kunne naastbestaanden
in ongen onbestendigheid en de bevolking van
het reyt, waerby alle misdaden door de
gelyken gelyk. Steeds ongestroft zijn gebouwen
de knuffe is, welke aan de volvaars van die
Land knuffe, en waerby eening knuffe een
herstel is, dan in de tydstip.

Het Steedslyk negens in een Steedslyk
iseen en gebroedlyke Sakkien van het bestam-
De Steedslyk Staat, waerby de Resident voor
zij, teek geon den knuffe, is wie die waer knuffe
in ongen, het Steedslyk der gelyken
Willekeur, ongen knuffe het reyt over knuffe
deid, en de ongen knuffe het reyt over knuffe.

Alle Europeanen zijn gebouwen van de
gen raan te reyt te staan. Een knuffe lode
an ongen knuffe is de knuffe en zal
nader door den knuffe knuffe en dierzelfs
koningheid van waerby Staat, het
Gouvernement eenen ongen knuffe met een ongen
knuffe

Laporan H.D. Steurs tentang situasi Bengkulu pada masa pemerintahan Inggris di Bengkulu tahun 1825 – 1826, Juli 1826
ANRI: Benkoelen 5/1



Catatan intisari hukum tentang penduduk pribumi yang menjadi bagian dari keberhasilan Sumatra dan memiliki ketergantungan terhadap kedudukan benteng Marlborough (*Fort Marlborough*), di Bengkulu, 1829
ANRI: Benkoelen 13

Batavia den 10. Maart 1830

aan den Gz. Gz.

hante

By resolutie van den 15. Januarij 1830, n:o 31, bevestigde het zynre Excellentie den Lieutenant Gouverneur Generaal, den aan onze bevestiging te onderwerpen, de edaet een goetwilligen bysambandige zaak, betrekkinglyk tot de of niet inlygen van eenige Palembangse Distrieten by Bantoe.

Tot dat einde zyn ons onderscheiden stukken toe hand gesteld, welke ons alle over de zaak in kwestie hande

Opzichron wij met den aard dezer gelykstaam bekend zyn, des is het onrecht niet onderstantig voorzekerde om vinner Excellentie een beknopt overzigt van de zaak te geven, en daarna tevens de redenen te verzamelen, die door de respectieve ambtlieden, te wel voor als tegen de inlyging de bedoelde Palembangse, distrieten in het midden zyn gebracht, zult

aan

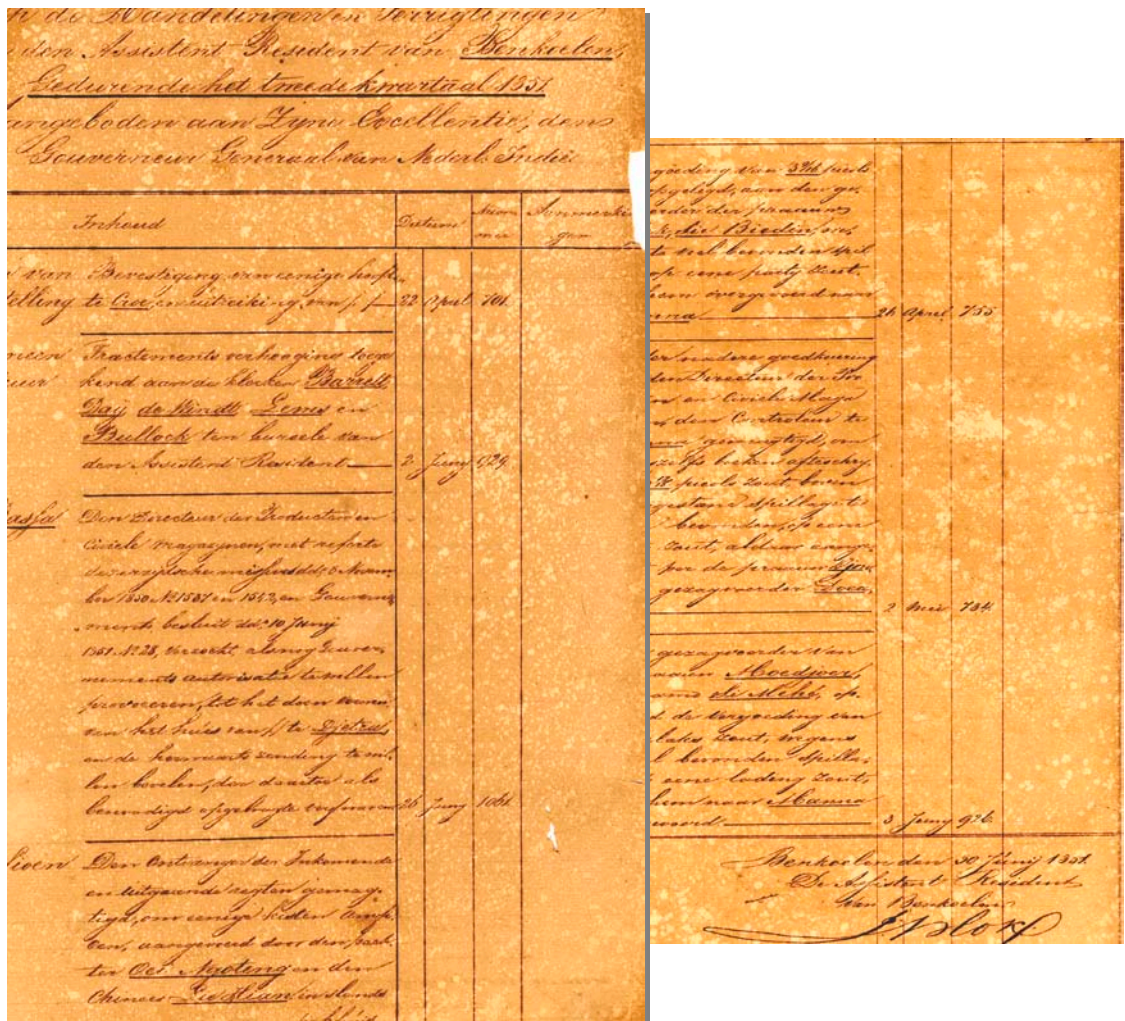
Gouverneur Generaal
Nederlandsch Indisch

wezen beschouwd, en daartoe wat ligt niet dan mogelijkheden te overdenken getraen worden. Het by het de in overzigtstelling met den heer van den, als wenschelyk beschouwd, om voor als nog aan onderscheppelijke inlyging geen gevolg te geven.

Opzichron van onze bevestiging een medegedeelde gelykstaam het my ons niet kunnen overzichten Excellentie en overzichtiging te geven de onderscheppelijke zaak te laten en later ges in de voortgang de plaatselijke districten van Palembang, in Bantoe aantofsen, om getamenlyk een nadere proef over het of niet inlygen der bedoelde Palembangse distrieten by Bantoe, aan het Gouvernement into dienen, en daartoe speciaal in overzichtiging te nemen, het in deze inlygting gevelen van den Kolonel de Alencas. Wy hebben de edaet de in onze handen gestelde st

van

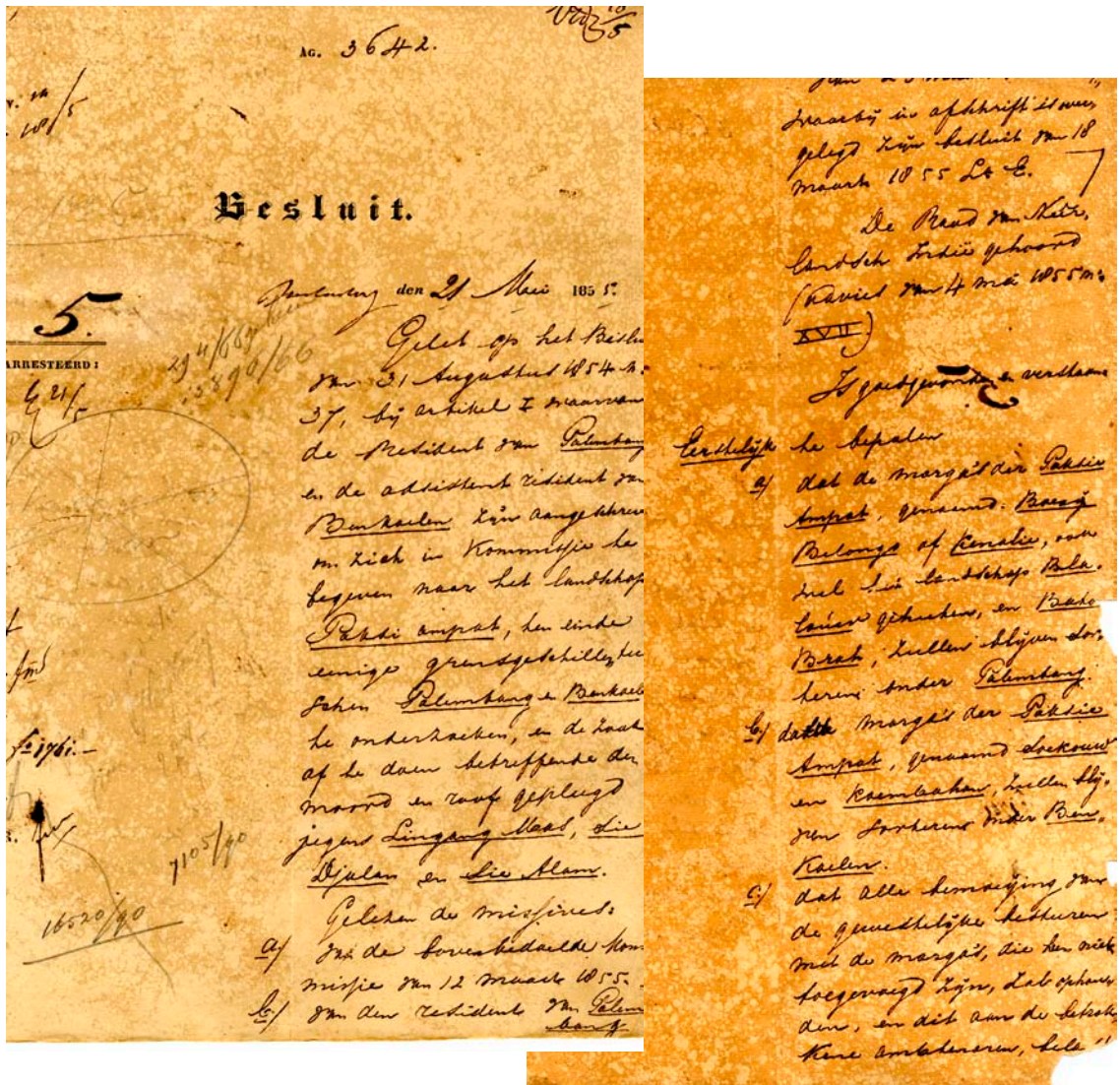
Surat dari Komisi Resolusi 15 Januari 1830 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang penggabungan Bengkulu dengan Palembang, 15 Maret 1830
ANRI: Palembang 70-5



Daftar administrasi tindakan dan penanganan terhadap permasalahan di wilayah Bengkulu oleh Asisten Resident Bengkulu selama bulan Mei sampai dengan Juni 1851 sebagai laporan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

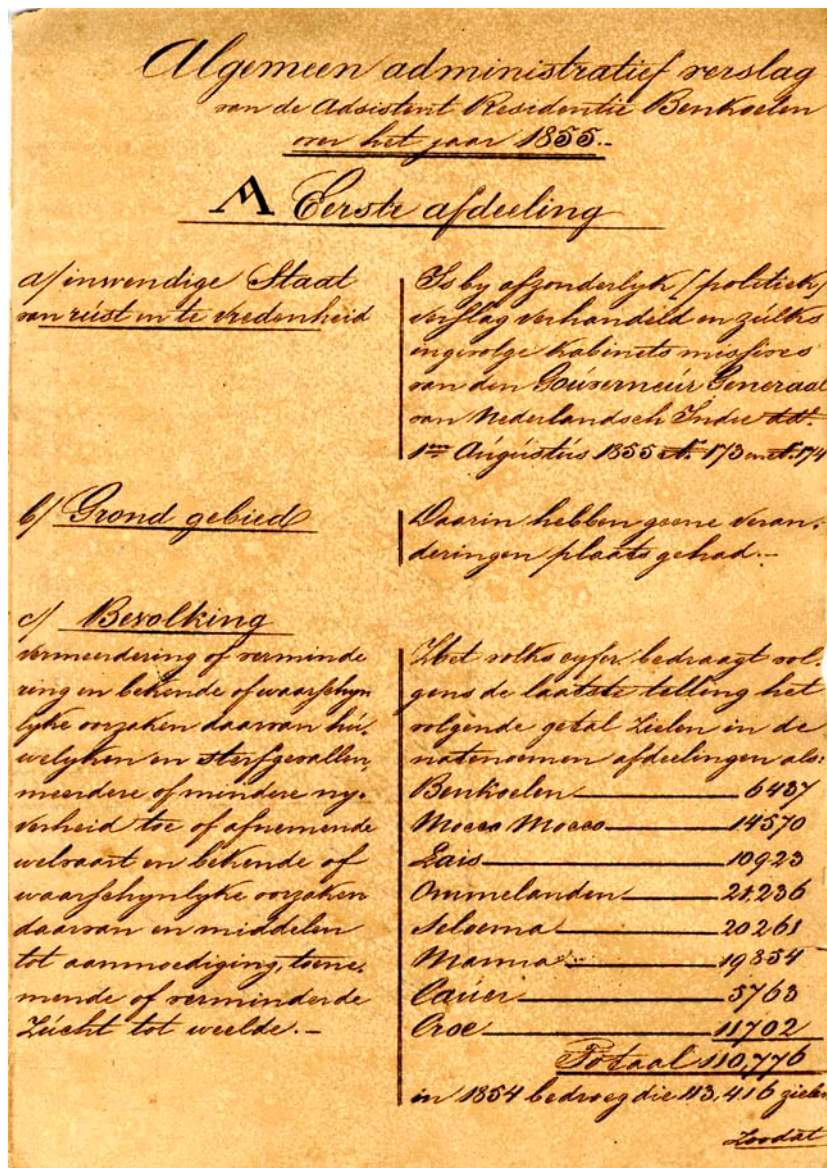
30 Juni 1851

ANRI: Benkoelen 6/1



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 5 tanggal 21 Mei 1855 tentang penentuan pemisahan batas wilayah Paksi Ampat antara Palembang dan Bengkulu, 21 Mei 1855

ANRI: Besluit No. 5 tanggal 21 Mei 1855

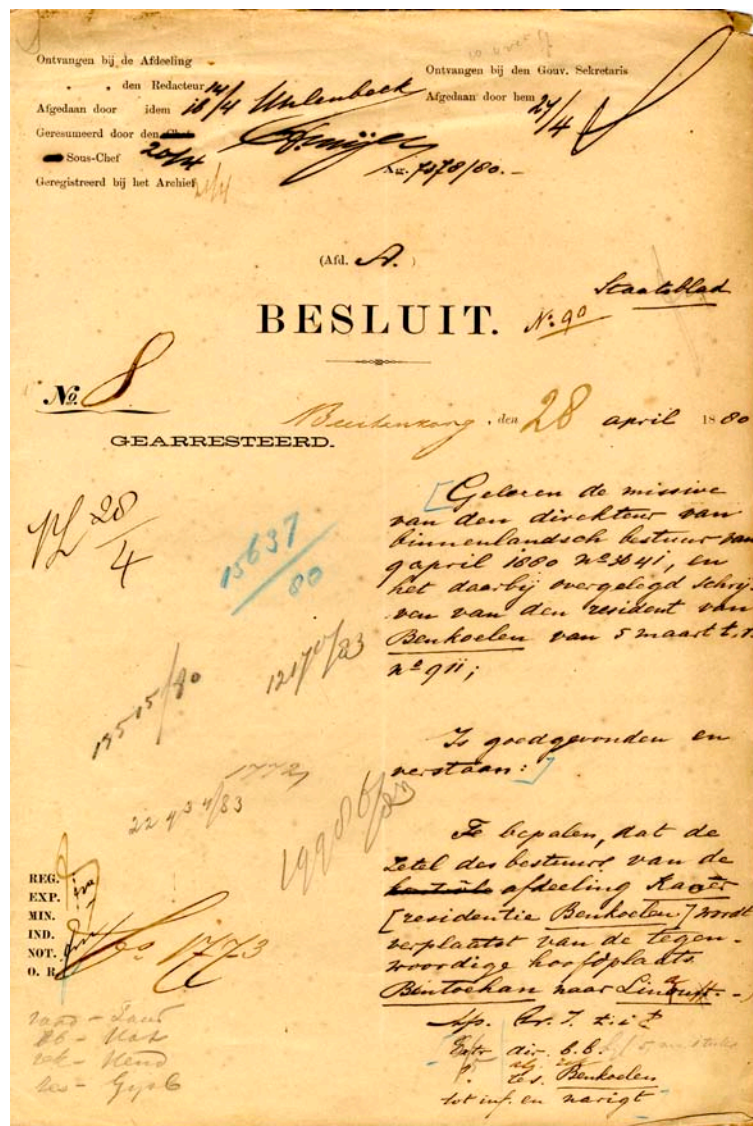


Bagian awal dari Laporan administrasi umum
Asisten Residen Bengkulu,
1855
ANRI: Benkoelen 3/1

900 / palen of 1 / 1000 / stap,
 per;
 6. Insoeken Rindo Hatti of
 Taba Pananjung en Ben-
 baalen 30 / derkig / palen
 of 3 / drief / stap;
 6. Insoeken Benbaalen en de
 Paletbaai 9 / regen / palen
 of 1 / een / stappe;
 Ten tweede: Elbagging te
 verlenen, van ~~aan~~
 den van aan de kaarten bij ver-
 sending van gelden en goudenen
 briefchen de ten art 1 ste en 6 ge-
 maakte plaatsen mit de betalen
 15.50 / vijftig centten / in aan-
 die Insoeken de in 6 geracinde
 10.20 / twintig centten / per
 hoofd en per stappe. -
 etc: Rind. hat inf
 plater. Mil. degt
 etc: Din. u. fin
 " : " ad. Prad
 " : " etc. Rind.
 " : " etc. Rind.
 " : " etc. Rind.
 etc: hat inf en manig

Gouverneur der Gouver. Sels
 Afgegaan door hem
 a. 1796/18
 Ontv. bij de Ad. 27/6
 den Redactoren 17/6
 Afged. door idem. 17/6
 Gecomm. door den
 Secret. 27/6
 Geregistr. bij het Archief 27/6
 BESLUIT.
 N^o 4
 GEARRETEERD:
 16075/18
 3560/71
 3442
 18000
 2392/36
 630
 15762/36
 Besluit van den Gouverneur
 1^o van het elb. bet. d. g. p. n. v.
 van 18 September 1862 art. 1
 2^o van den Directie der Posten
 en Circul. elbaggingen van 27
 September 1862 art. 1
 3^o van de algemeene Rekeningen
 van 10 October 1862 art. 1
 Het goedgevonden en
 sluitsamen
 Eerw. G. D. de Gouverneur, dat de afstanden
 tusschen de onderschreven plaatsen
 die vallen geschiedt, overzamen
 te betragen:
 1. Insoeken Koppakrang / Palen
 2. Insoeken Rindo Hatti of Taba
 Pananjung / Benbaalen / 900 /

Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 4
 tanggal 30 Oktober 1862 tentang penentuan jarak batas wilayah
 antara Kepahiang (Palembang) dan Rindo Hatti atau Taba
 Pananjung (Bengkulu)
 30 Oktober 1862
 ANRI: Besluit No. 4 tanggal 30 Oktober 1862



Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 8 tanggal 28 April 1880 tentang pemindahan ibukota pemerintahan *afdeeling* Kaur (Residensi Bengkulu) dari Bentuhan ke Linau

28 April 1880

ANRI: Besluit No. 8 tanggal 28 April 1880

Ontvangen bij de Afdeling
 " " den Rolactour
 Afgedaan door idem 20/4 1880
 Gereguleerd door den Chef
 Gereguleerd bij het
 Ontvangen bij den Govv. Sekretaris
 Afgedaan door hem 30/4 1880
 N^o 8339/80.

(Afd. A.)

BESLUIT.

N^o 8

Bestemd op den 30 april 1880

GEARRESTEERD.

W.L. 30/4

Cyclus op artikel 1
 der ordonnancie van 2 febru-
 rij 1880 [staatsblad n^o 33] en
 op artikel 2 van het konink-
 lyk besluit van 12 november
 1879 n^o 40 [Indisch staatsblad
 1880 n^o 54];

Gelezen de missive
 van den directeur van justie
 toe van 20 april 1880 n^o 1777;

To goedgevonden en
 verstaan:

Met wijziging in zoo-
 ver van de 2^{de} a. b. en d. van
 artikel 2 van het besluit
 van 24 maart 1875 n^o 47

[Staatsblad]

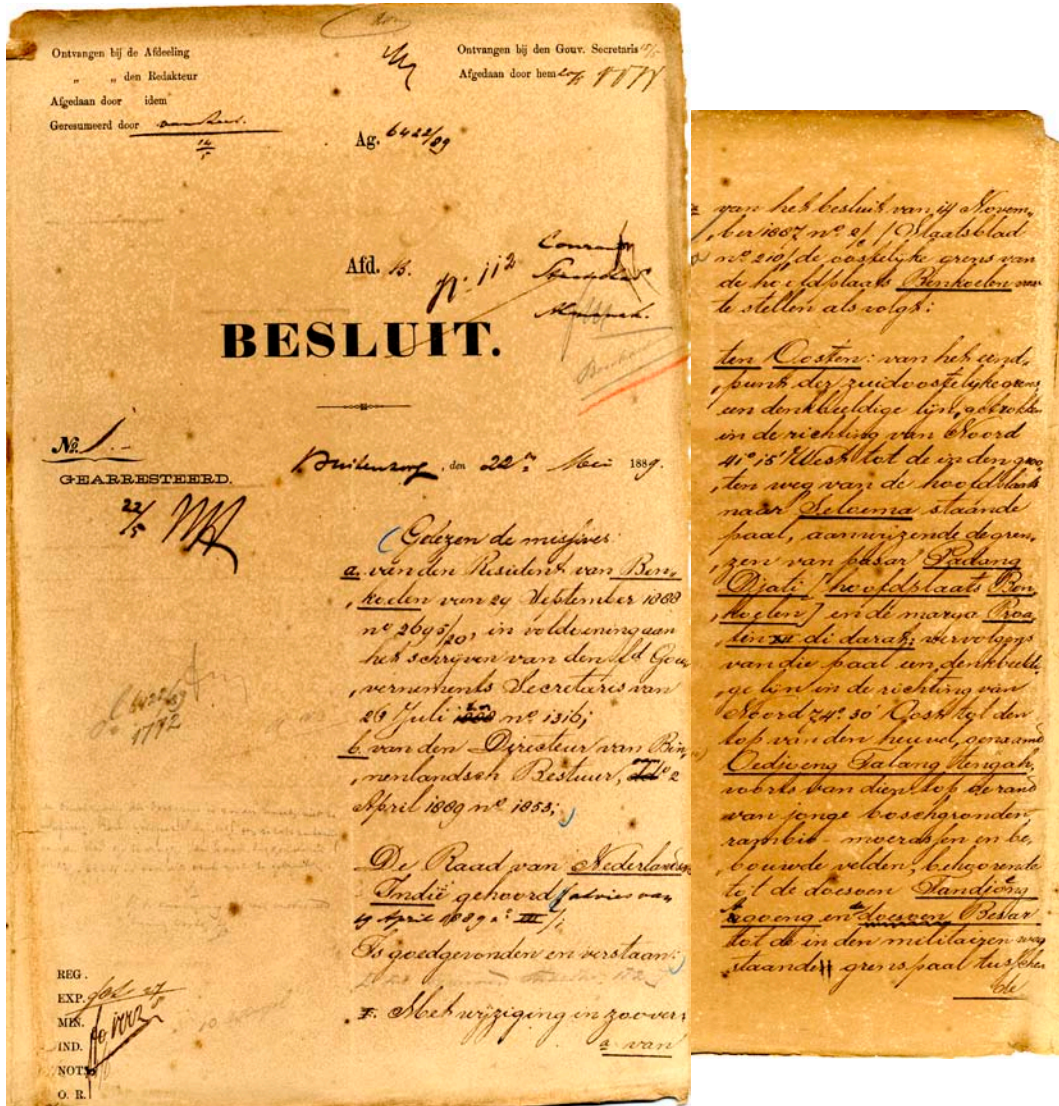
[Staatsblad 1880] te
 bepalen:

dat met ingang van
 1 mei 1880 te Bengkulu
 in stede van twee agenten
 der weeskamer te Bateria
 twee agenten der weeskamer
 te Padang [Namatra's hat
 hatt] worden in dienst
 gesteld, op een bezoldiging
 van 100 [een hondert vijftig]
 gulden 1/4 jaars ieder;

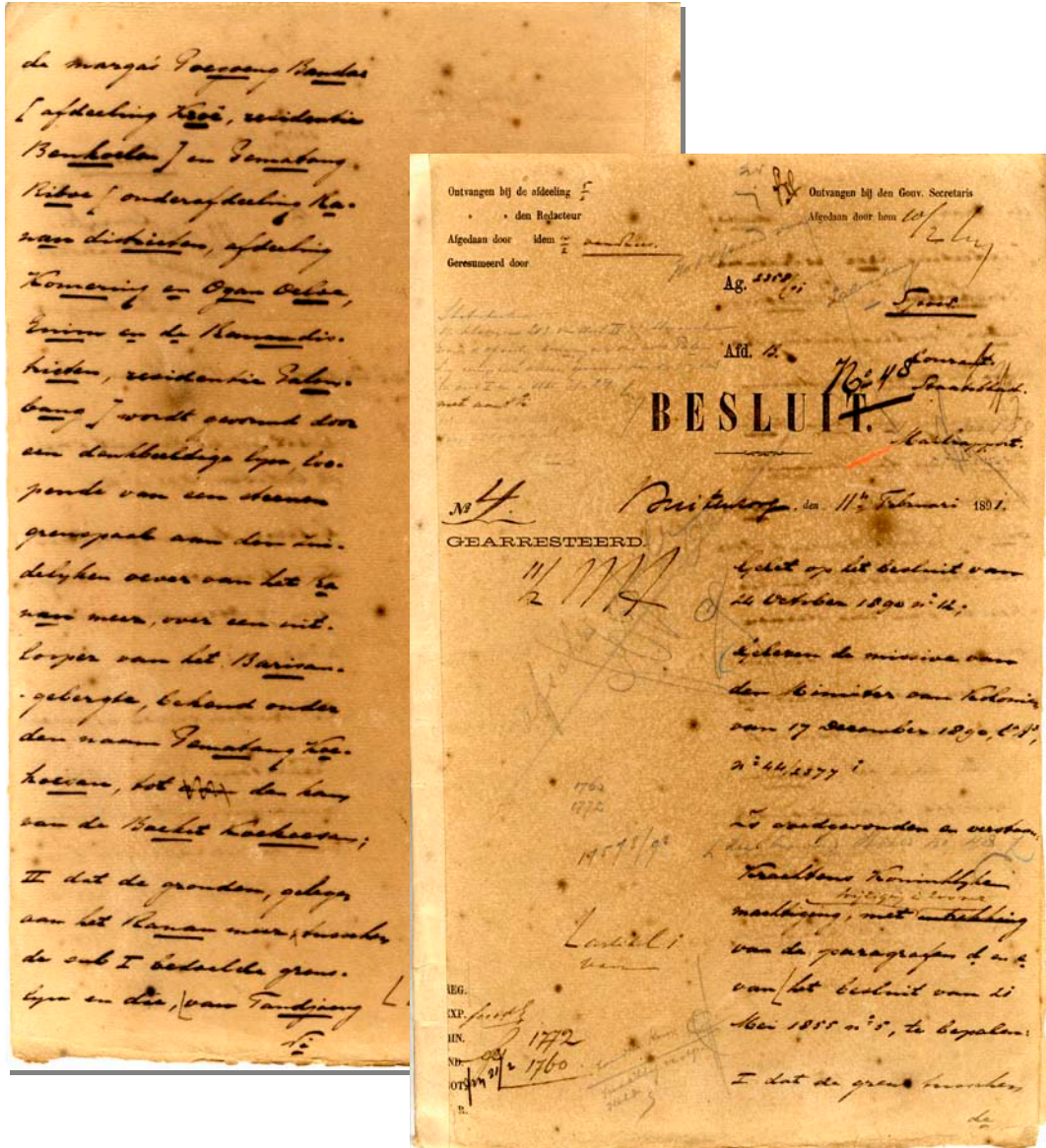
dat met ingang van
 1 juni 1880 te Banjari-
malen, in stede van twee
 agenten der weeskamer te
 Bateria, twee agenten der
 weeskamer te Sorabaya
 worden in dienst gesteld
 op een bezoldiging van
 100 [twee hondert gulden]
 1/4 jaars ieder.

Dat de justie
 fin.
 alg. rek.
 weeskamer Bateria, te
 Surabaya a Padang id. 7 l. a.
 tot inf. a. navigt

Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 8 tanggal 30 April 1880 tentang penempatan pegawai dari Batavia dan Padang untuk lembaga yatim piatu dan warisan (Weeskamer) di Bengkulu 30 April 1880 ANRI: Besluit No. 8 tanggal 30 April 1880



Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 tanggal 22 Mei 1889 tentang perubahan batas wilayah bagian timur ibukota Bengkulu
22 Mei 1889
ANRI: Besluit No. 1 tanggal 22 Mei 1889



Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 11 Februari 1891 tentang penentuan pemisahan batas wilayah antara marga Pugung Bandar, *afdeeling* Kroe (Bengkulu) dengan Pematang Ribu, *onderafdeeling* Ranau (Palembang) 11 Februari 1891
 ANRI: Besluit No. 4 tanggal 11 Februari 1891

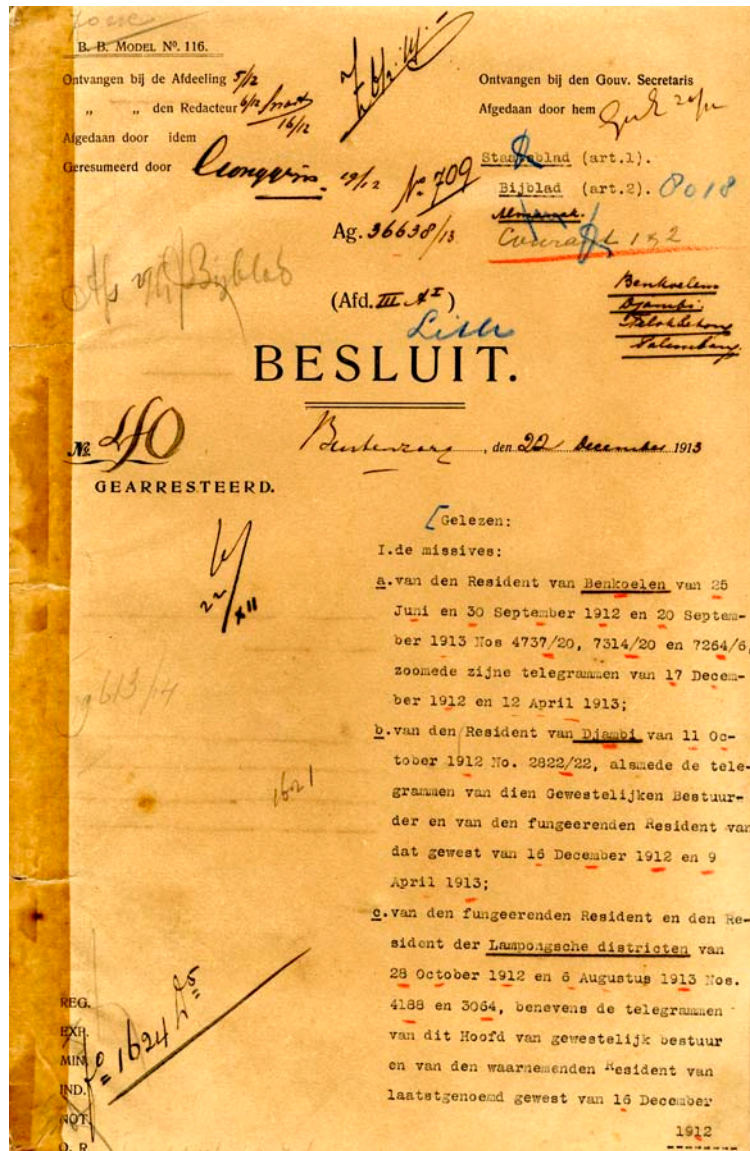
Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
No. 8 tanggal 2 Februari 1899 tentang perubahan peraturan dan
pedoman hukum pemerintahan daerah Bengkulu

2 Februari 1899

ANRI: Besluit No. 8 tanggal 2 Februari 1899

Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 51
tanggal 10 Juli 1912 tentang penyesuaian jabatan
ketua hakim kecil yang bertugas di Bengkulu
10 Juli 1912

ANRI: Besluit No. 51 tanggal 10 Juli 1912



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 40 tanggal 22 Desember 1913 tentang penentuan penggunaan nama jabatan bagi kepala *distrik* dan *onderdistrik* untuk menggantikan penyebutan nama Demang dan Asisten Demang 22 Desember 1913

ANRI: Besluit No. 40 tanggal 22 Desember 1913



Presiden Soekarno berkunjung ke Bengkulu dan menyempatkan diri melihat pohon beringin yang ditanam beliau semasa pengasingannya di Bengkulu,
14 November 1952.
[ANRI: Kempen 521114 DD92](#)



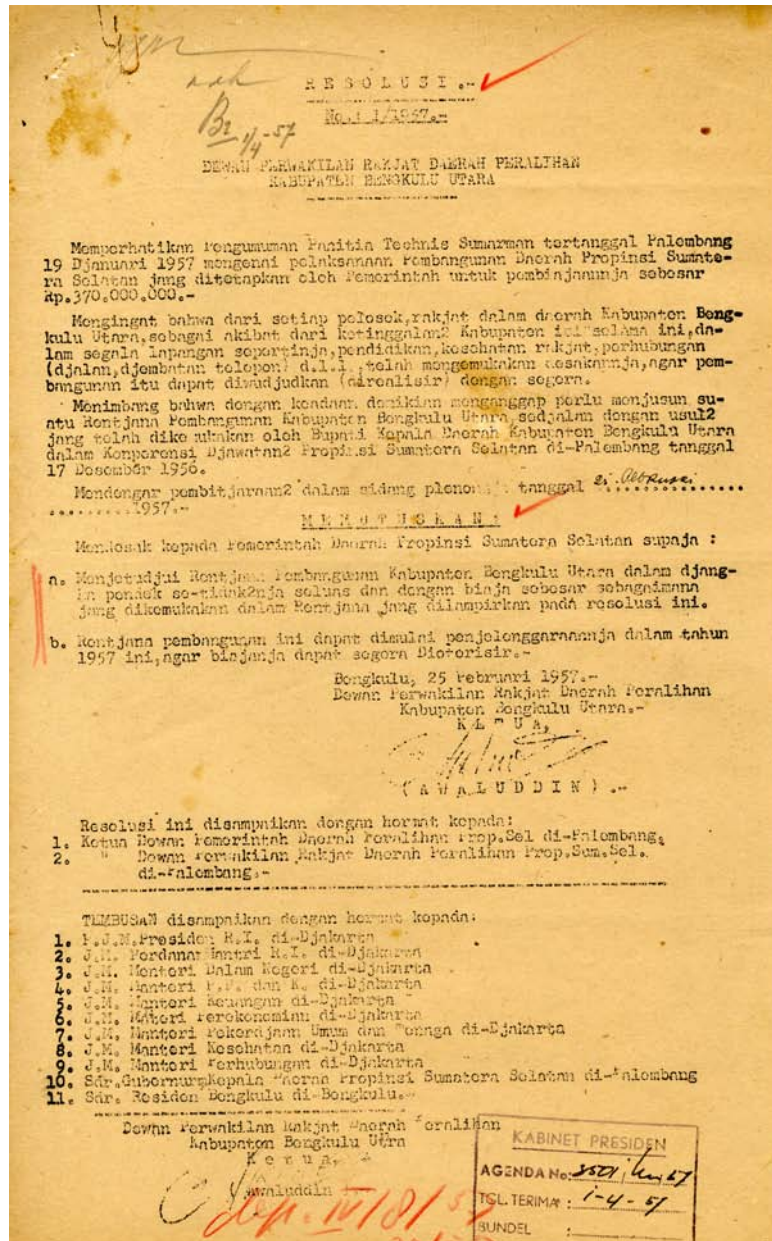
Tanda gambar Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang dipasang pada muka sebuah rumah dalam rangka menyambut Pemilihan Umum, 1955

ANRI: Kempen 520125 KM



Wanita tua dan muda berbaris rapih menanti giliran
memberikan hak suara mereka pada Pemilihan Umum,
1955

ANRI: Kempen R 520125 FG1



Resolusi DPRD Peralihan Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 1/1957 mengenai rencana pembangunan
Kabupaten Bengkulu Utara,
25 Februari 1957
ANRI: Kabinet Presiden 902

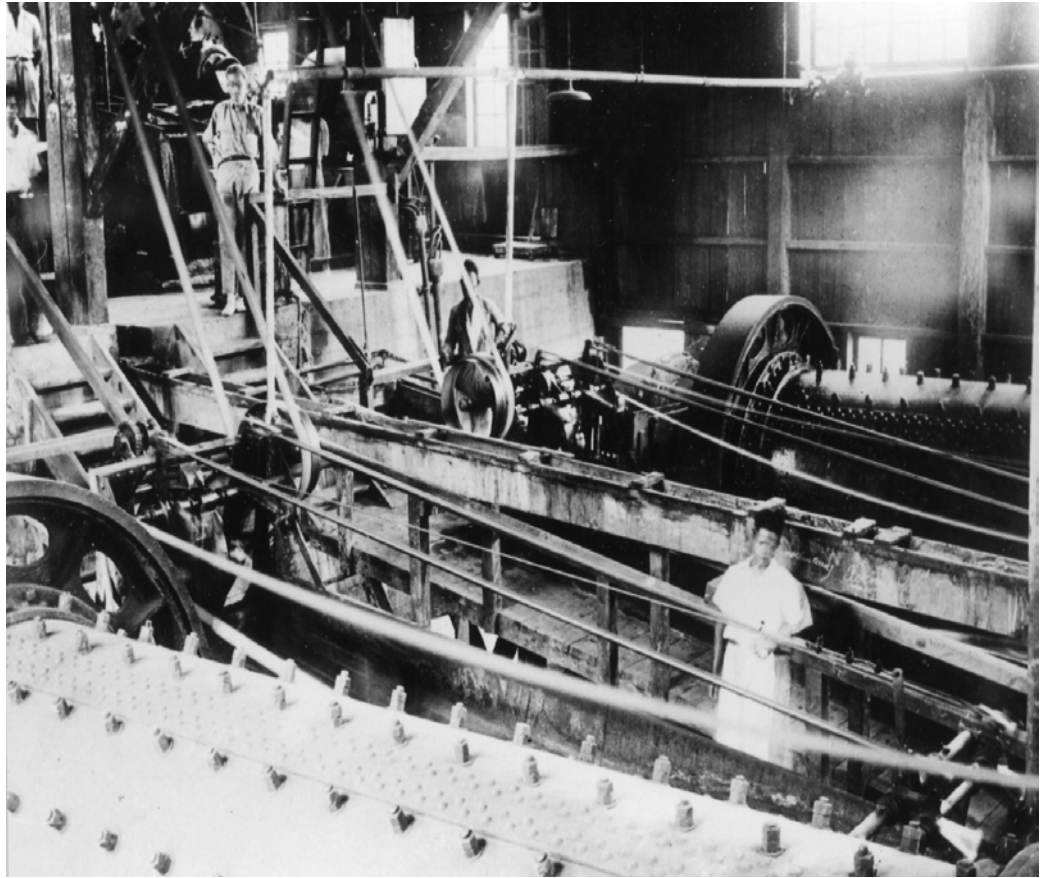


Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pidato
pada Rapat Umum di Bengkulu

3 Juli 1957

[ANRI: Kempen 570703 CC1](#)

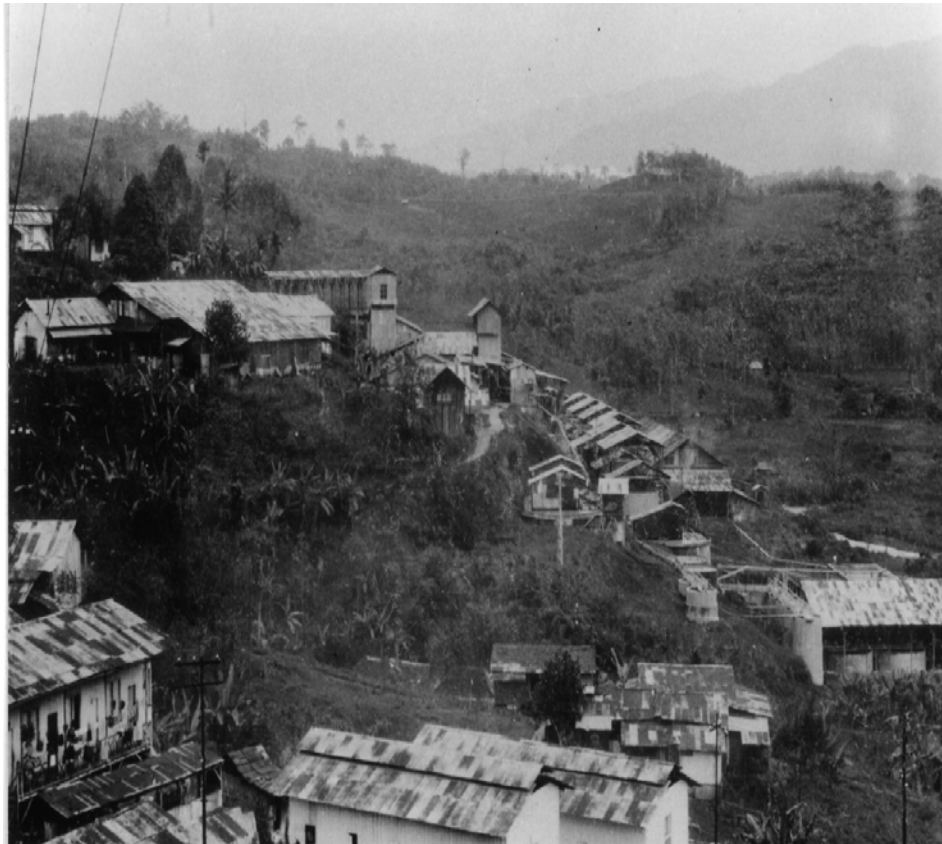
Industri dan Pertambangan



Alat gilingan pasir dan lumpur di pertambangan emas dan perak
Tambang Sawah, Bengkulu

[± 1930]

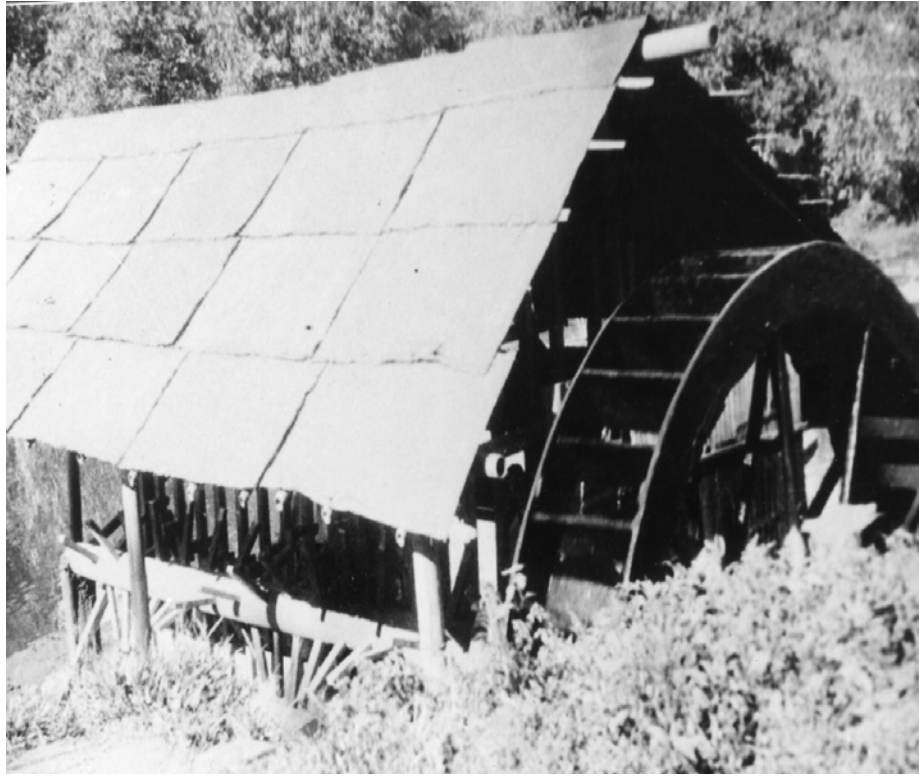
ANRI: KIT 489/46



Instalasi pengolahan pertambangan emas dan perak
di Lebong Donok (Rejang Lebong)

[± 1930]

ANRI: KIT 488/78

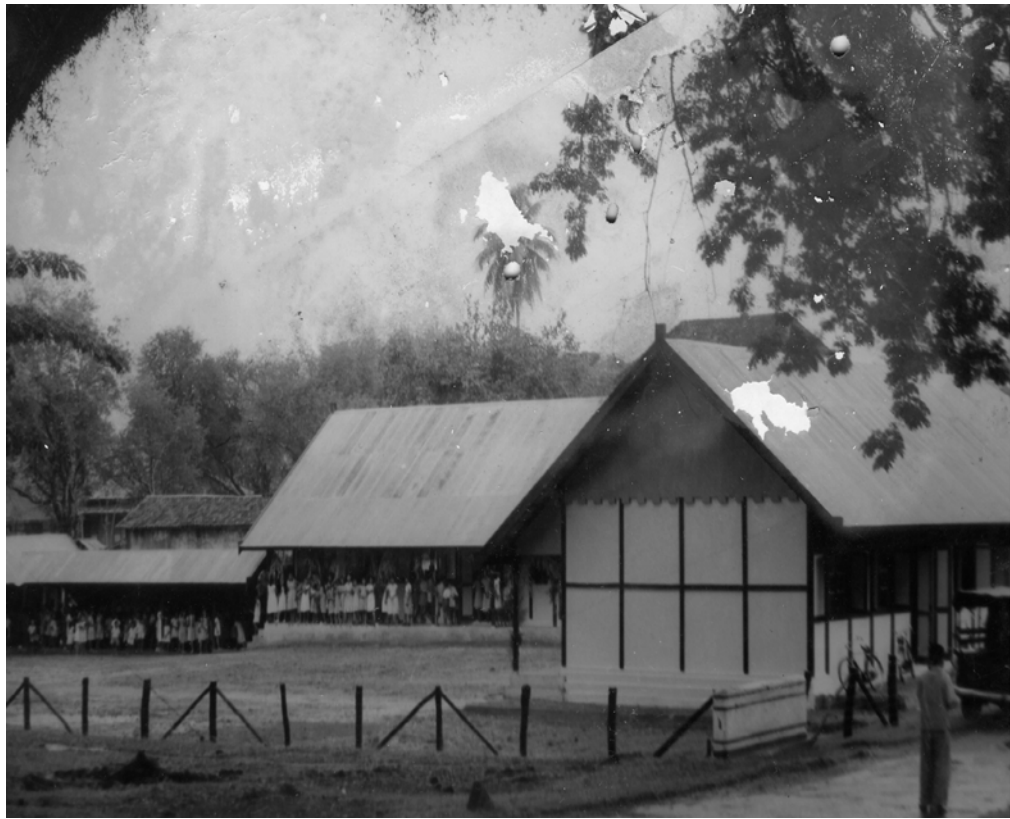


Pabrik kopi milik rakyat yang menggunakan tenaga air
di Curup, Bengkulu

[± 1930]

ANRI: KIT 607/44

Pendidikan

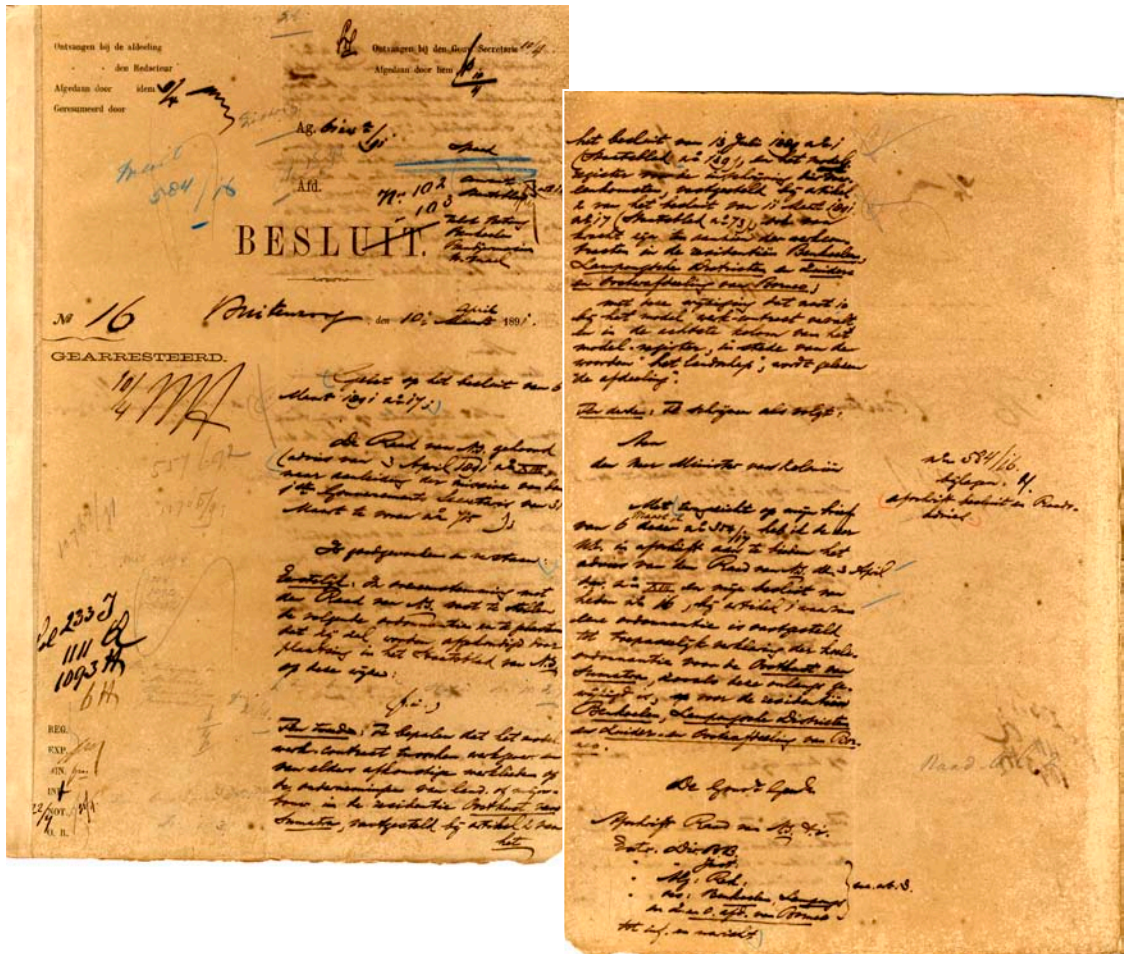


Pembukaan sebuah Sekolah Rakyat di Bengkulu.
Nampak murid-murid berseragam putih berbaris di muka kelas.
[ANRI: Kempen 2891/C/Z](#)



Kegiatan *drumband* dari Kemanduan di Rejang Lebong,
Bengkulu,
11 Maret 1956
[ANRI: Kempen 560311 PD9](#)

Pertanian dan Perkebunan



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 16 tanggal 10 April 1891 tentang petunjuk pengaturan hukum dan kewajiban para pemilik perkebunan dan para pekerja perkebunan di Residensi Bengkulu yang berasal dari daerah lain
10 April 1891

ANRI: Besluit No. 16 Tanggal 10 April 1891

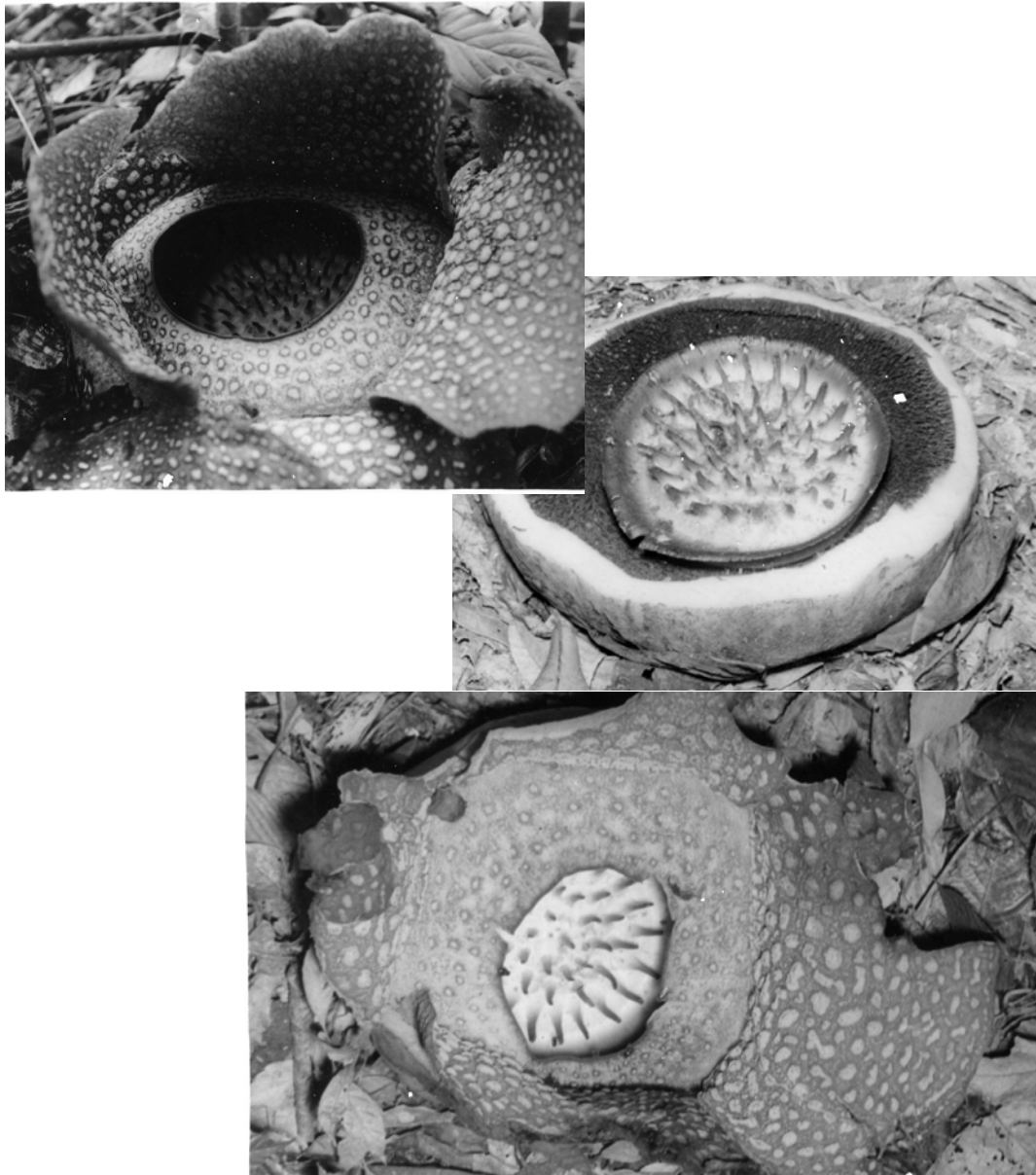


Budidaya teh di Kaba Wetan, Bengkulu,
[+ 1930]
ANRI: KIT 82/70



Persemaian pala di kebun pertanian rakyat di Bengkulu,
23 Maret 1953

[ANRI: Kempen 530323 CC2](#)

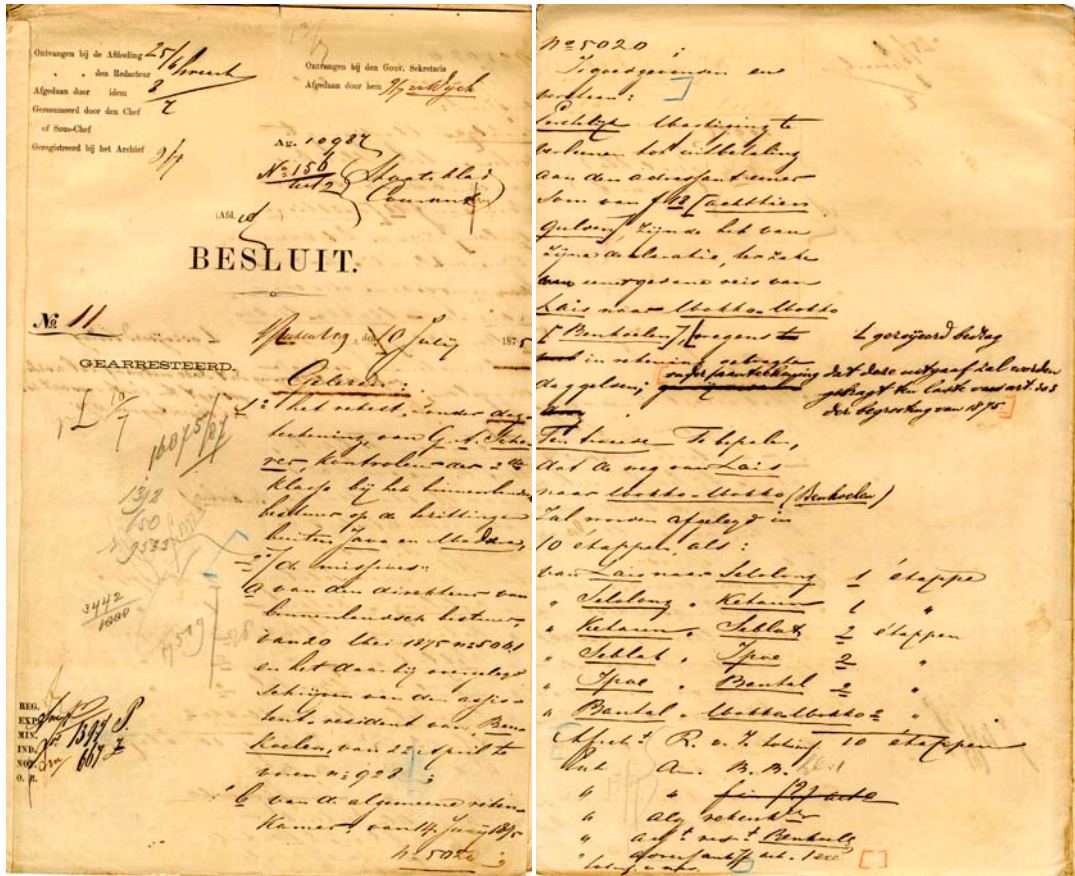


Bunga Rafflesia Arnoldi dalam berbagai bentuk
di Kabupaten Rejang Lebong,
25 November 1957
[ANRI: Kempen 571125](#)



Bunga Raksasa Kuling setinggi 2.5 meter di Curup, Bengkulu.
Gambar menunjukkan perbandingan tinggi antara bunga dan
orang-orang yang mengelilinginya
10 Januari 1957
[ANRI: Kempen R 570110](#)

Perhubungan



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tanggal 10 Juli 1875 tentang pembagian tempat pemberhentian dalam perjalanan dari Lais ke Mokko – Mokko, Bengkulu
 10 Juli 1875
 ANRI: Besluit No. 11 tanggal 10 Juli 1875



Sebuah delman melintas di tengah kota Bengkulu.
Nampak Tugu Peringatan disisi kanan jalan

[± 1930]

ANRI: KIT 753/69



Jembatan yang terbuat dari bambu sebagai alat penghubung
di Lebong Sulit, Bengkulu
[+ 1930]
ANRI: KIT 526/42



Salah satu kapal dari pelayaran *Koninklijk Paketvaart
Maatschapij* (KPM) sedang bersandar di pelabuhan Bengkulu,
16 Mei 1955

ANRI: Kempen 550516 BB 1



Pembukaan tiga buah jembatan beton yang dibangun bersama rakyat dan NV Associate di daerah Bengkulu Agustus 1958

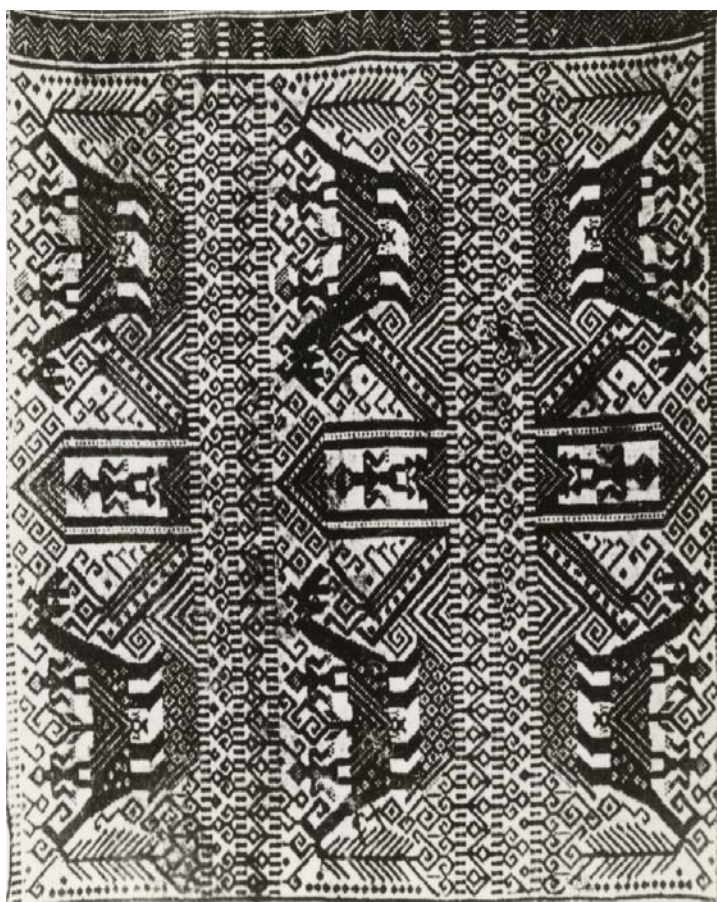
[ANRI: Kempen 441/B](#)



Suasana di pantai pelabuhan Bengkulu. Penumpang yang baru turun dari kapal hendak menuju ke daratan dengan menggunakan perahu
20 Mei 1955

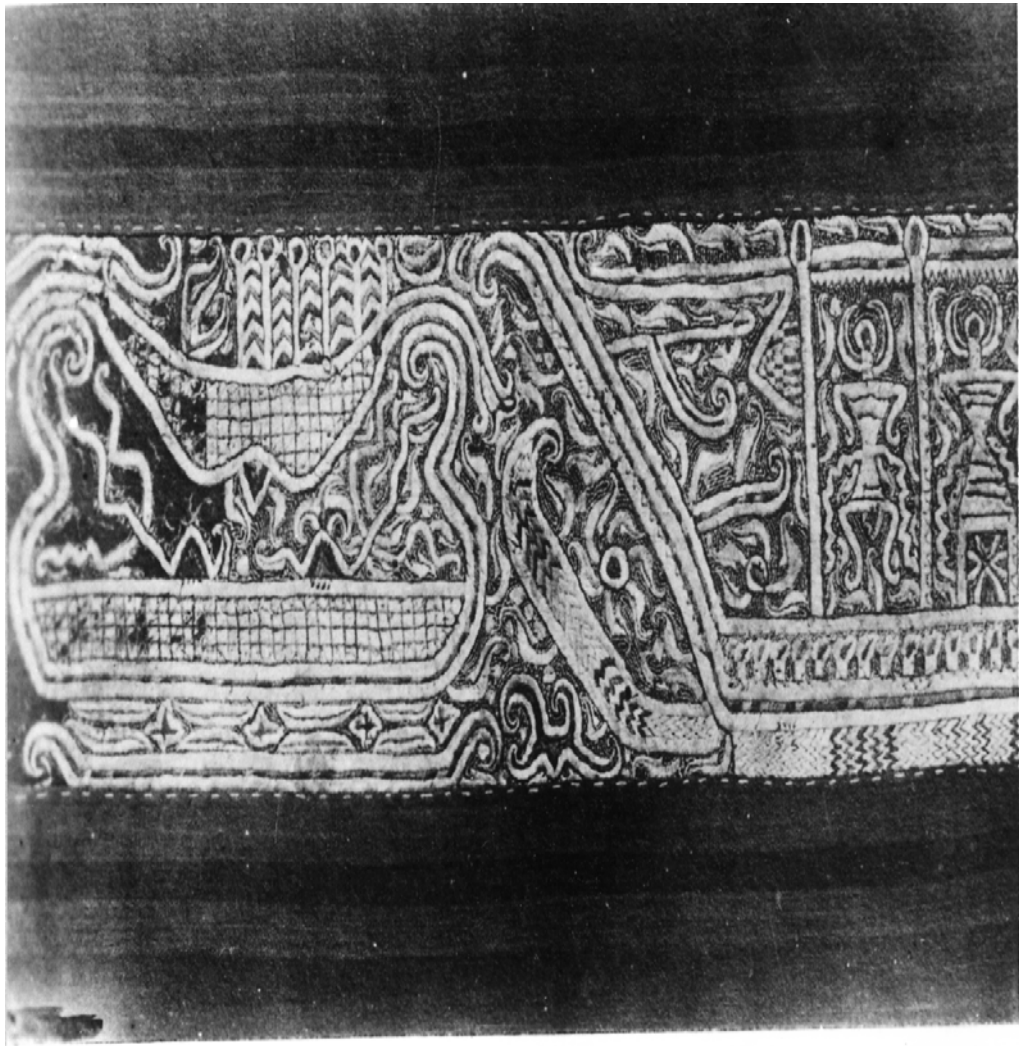
ANRI: Kempen 550520 CC1

Kebudayaan



Katun antik Bengkulu dengan pola tambahan hiasan salur
[± 1930]

ANRI: KIT 729/6



Sulaman kain renda khas Bengkulu di atas sebuah sarung
[± 1930]

ANRI: KIT 740/75



Profil masyarakat di Kesamba, Bengkulu
[± 1930]
ANRI: KIT 472/32



Salah satu jenis jimat yang dipercayai masyarakat
di Pulau Enggano, Bengkulu

[± 1930]

ANRI: KIT 871/40



Lempas lembing merupakan salah satu ketrampilan masyarakat
di Pulau Enggano
[± 1930]
ANRI: KIT 924/13



Seorang bapak sedang memainkan alat musik tiup Serunai
salah satu alat musik khas Bengkulu
[± 1930]
ANRI: KIT 910/2



Perkumpulan kesenian musik Melayu, Bengkulu,
terdiri dari rebana, rebab, kendang, biola dan serunai
[± 1920]
ANRI : KIT 908/85



Profil masyarakat Suku Rejang di desa Simpang Tiga,
Bengkulu,
14 Agustus 1954
[ANRI: Kempen 540814 CC2](#)



Pertandingan tinju yang berlangsung saat pasar malam di Curup,
Bengkulu
25 Agustus 1956
ANRI: [Kempen 560825 JRO36](#)



Sketsa pakaian adat khas masyarakat Bengkulu
dengan latar belakang Rumah Gadang adat Bengkulu
2007

Bangunan



Pertokoan di Bengkulu yang tengah dibangun kembali
setelah gempa bumi yang terjadi tahun 1914
[± 1920]
ANRI: KIT 48/52



Benteng Marlborough di Bengkulu,
1926
ANRI: KIT 128/62



Rumah sakit Kepahiang, Bengkulu,
1926
ANRI: KIT 126/53

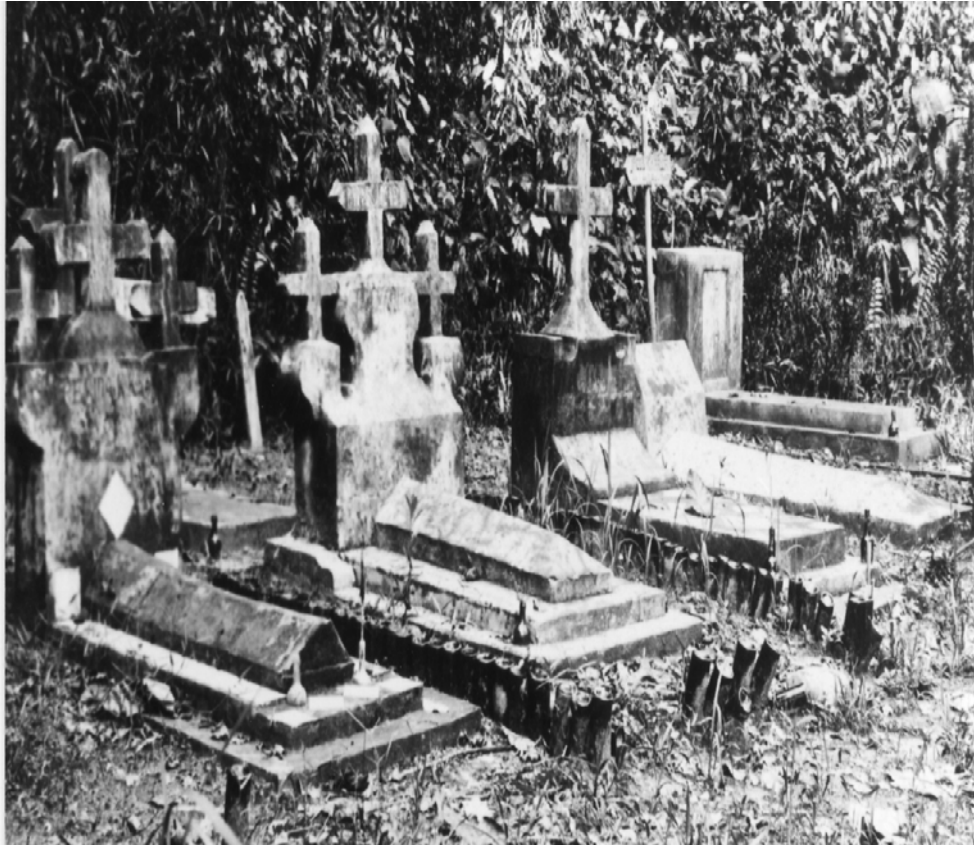


Kampung Pecinan di Bengkulu
1926
ANRI: KIT 294/74



Penginapan di daerah pertambangan Lebong Tandai,
Bengkulu
1928

ANRI: KIT 488/80



Salah satu kompleks pemakaman Nasrani kuno di Pulau Enggano,
Bengkulu
1928
ANRI: KIT 812/23



Salah satu masjid di kota Bengkulu
[± 1930]
ANRI: KIT 803/13



Profil rumah penduduk di Sempiang, Bengkulu
[± 1930]
ANRI: KIT 844/60



Sebuah Pesanggrahan di Pulau Dua, Bengkulu
[± 1930]
ANRI: KIT 861/26



Tugu di pusat kota Bengkulu peninggalan Pemerintahan Inggris
di Bengkulu pada abad ke-18,
25 Juli 1952
[ANRI: Kempen 527125 KM](#)

Panorama



Suasana di sekitar Sungai Ketahun, Bengkulu
1926

ANRI: KIT 126/39

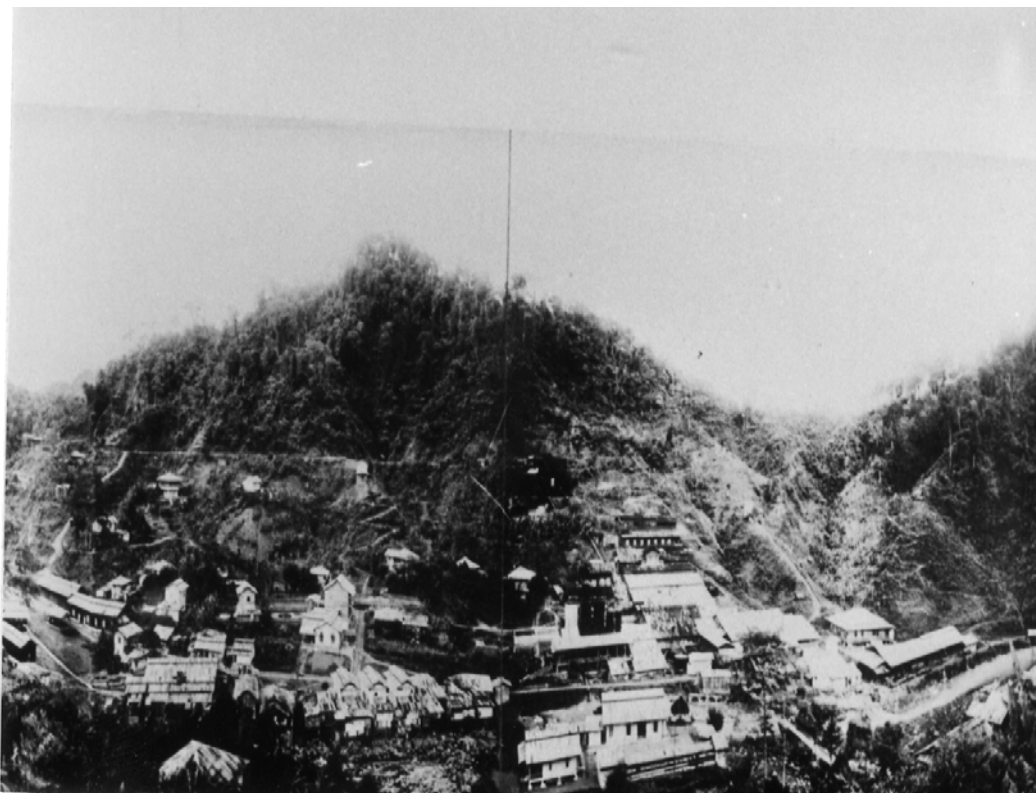


Pemandangan di sekitar Aer Ketahun, Bengkulu
1926

ANRI: KIT 953/43



Air terjun Aer Klingi di Curup, Bengkulu,
salah satu objek wisata masyarakat Bengkulu
1927
ANRI: KIT 953/36



Panorama di sekitar Leborg Tandai, Bengkulu
1928

ANRI: KIT 488/82



Panorama di sekitar Pesisir Tais, Bengkulu
1929
ANRI: KIT 953/39



Pemandangan di sekitar pantai kota Bengkulu
15 Maret 1956

ANRI: Kempen 560315 Pan11

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kalimantan Tengah Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta 12560

Telp. 021-7805851, Fax. 021-7805812, 7810280

www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id